

Memotret Beberapa Episode Semasa Ali Memimpin Jakarta

AKTUAL

Edisi 51 | 16 - 31 Maret 2016

MEMBACA LANGKAH AHOK

Ahok pada dasarnya
adalah tetap seorang
player, seorang politisi!

ISSN 2337-8395



WWW.AKTUAL.COM

memberi anda
perspektif
yang berbeda ...



aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

AKTUAL
MAGAZINE

aktual 

Info Dan Pemasaran :

 **081517933376** (Dedy)

081280941009 (Rhiza)

 **iklan@aktual.com**

marketing@aktual.com | **sirkulasi@aktual.com**

 **www.aktual.com**

PENDIRI M. Danial Nafis
KOMISARIS Yudi Latif

PEMIMPIN REDAKSI Faizal Rizki Arief
SEKRETARIS REDAKSI Tsurayya Zahra
REDAKTUR SENIOR Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi
SIDANG REDAKSI Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Wahyu Romadhony

REDAKTUR Wahyu Romadhony, Nebby Mahbubirrahman, Sukardjito, Ismed Eka Kusuma, Tino Oktaviano (Foto)

ASISTEN REDAKTUR Zaenal Arifin, M. Vidia Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Arbie Marwan, Vivin Sri Wahyuni

STAF REDAKSI Soemitro, Fadlan Syam Butho, Nailin In Saroh, Mochammad Zaky Kusumo, Novrizal Sikumbang, Warnoto (TV), Junaidi (Foto), Munzir (Foto), Leonina K Lahama, Eko Sumaryanto (Foto Komersial), Agung Rizki, Dadangsaah, Najamuddin Arfah, Refli Mulyadi, Fatah Hidayat Sidik.

DESAIN GRAFIS Shofrul Hadi

NETWORK Tri Wahyudi (Hd), Rendra Muhammad Nur Islam

SMC Resya Muhammad Irgi, Taufik, Iqbal Maulana

KONTRIBUTOR LUAR NEGERI Fitra Ismu (Meksiko)

REPORTER DAERAH Masriadi Sambo (Aceh), Damai Oktavianus Mendrota (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), A, Bobby Andalan (Denpasar), Andri Wawan MS Husen (Palu), Nelson Nafis (Yogyakarta)

MANAGER KEUANGAN Kasep Natakusumah
STAF KEUANGAN Zulkarnain, Vinka H P
HRD & KESEKRETARIATAN Nuryana
SIRKULASI Widhi Maulana, Bayu Aji
MARKETING OFFICER Dedy Kusnaedi, Rhiza Adittha
ADMIN MARKETING Yulita Trinanda Pangastuti

ALAMAT REDAKSI
Graha Aktual: Jl. Tebet Barat VIII no.50 Jakarta Selatan, Indonesia Kode pos: 12810
Telp. 021 83794508 (Hunting)
Fax. 021 83794706

redaksi@aktual.com
iklan@aktual.com

aktual.com
TERHANGAT TERPERCAYA

aktual
NEWS

Membaca Langkah Ahok

Pembaca yang budiman, hawa persaingan menuju DKI1 buat Pilkada DKI Jakarta depan mulai memanans.

Petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang rencananya akan maju mulai mendapat perlawanan. Beberapa nama mulai muncul. Mulai dari Ichsanuridin Noorsy, Yusril Ihza Mahendra sampai sekelas artis Ahmad Dhani.

Laporan Utama kali ini, soal Ahok dan isu Pilkada DKI Jakarta akan jadi ulasan. Langkah Ahok yang sarat kontroversi ini membuat banyak pro kontra, mulai dari isu TemanAhok sampai langkahnya untuk maju independen.

Namun, bagi masyarakat yang 'melek' politik, ternyata hampir seluruh langkah Ahok untuk menuju DKI1 diduga hanya strategi pencitraan saja. Minus prestasi. Beberapa artikel di edisi kali ini akan mengungkap hal tersebut.

Seperti halnya, ketika Jokowi yang 'jaya' lewat pencitraan. Setelah duduk di RI1, beberapa masalah di politik manajemen birokrasi mulai muncul. Dalam kolom Kaki Hari nya, Yudi Latif menyebut politik manajemen kabinet Jokowi sebagai sebagai "Kabinet Tuna Visi". "Politik dan pemerintahan tanpa visi ideologis tak menyediakan basis nilai dan harapan," demikian salah satu kutipan dari artikel Yudi Latif.

Artikel menarik lain adalah soal, boikot produk Israel. Kalau mau jujur, dalam arti praktis, seruan

Jokowi mungkin lebih bersifat simbolis dan politis. Karena kalau mau bicara detail, apa saja sih produk Israel –yang jelas-jelas ditulis Made in Israel–yang beredar di Indonesia? Praktis bisa dibilang "tidak ada." Ini salah satu catatannya.

Isu menarik lain adalah soal siapa Kapolri setelah Badrodin Haiti? Isu ini menarik untuk terus dipantau. Terutama ketika Tito Karnavian posisinya digeser ke BNPT. Ada beberapa nama yang muncul di bursa calon pengganti Badrodin. Siapa saja mereka?

Isu menarik lain yang mencuat adalah soal utang dari China. Ternyata setelah di-breakdown, diduga utang tersebut kebanyakan disalurkan ke beberapa konglomerat. Hal ini terkuak setelah DPR memanggil kementerian BUMN untuk menjelaskan soal Utang China ke Indonesia. Simak tulisan ini di rubrik Ekonomi.

Beberapa tulisan menarik lain juga kami sajikan di edisi kali ini. Semoga bermanfaat... Selamat membaca.

Redaksi



Daftar Isi

Edisi 51 | Tahun ke-4 | 16 - 31 Maret 2016

LAPORAN UTAMA

18 Mengintip Langkah Ahok

Potensi Ahok 'tumbang' pada kontestasi politik lokal juga dipengaruhi dari sikapnya terhadap partai politik, karena kerap berkonfrontasi dan resistensinya cukup besar.



22 Mengupas Gaya Pencitraan Ahok

Ajang Pilkada DKI Jakarta menjadi "medan tempur" yang menantang bagi perang pencitraan, antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan para kandidat lainnya. Ahok mencoba menampilkan gaya kepemimpinan mirip Bang Ali, tetapi belum "menjiwai."



26 Memotret Beberapa Episode Semasa Ali Memimpin Jakarta

Kalau dibandingkan dengan Ahok yang begitu gampangya mengizinkan Reklamasi Teluk Jakarta, maka bang Ali justru megecam praktek beberapa yayasan perguruan yang menguasai secara penuh tanah-tanah di wilayah Jakarta, tapi tidak mempergunakannya untuk kepentingan pendidikan.



14 AKTUAL REVIEW

'Tiki-Taka' Pemilukada DKI Jakarta 2017

Kita harus siap terima kenyataan nanti Ahok terpilih menjadi gubernur DKI periode 2017-2022, kalau penantangya tidak cerdas mengolah isu. Penantang Ahok harus bisa bermain cantik seperti irama permainan bola 'Tiki-taka' ala Barcelona.

32 HUKUM

Teater Besar di Trunojoyo

PDI-P menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden selaku sutradara dalam mengambil sebuah kebijakan dalam pemilihan bursa Kapolri.

38 EKONOMI

Utang dari China Berujung ke Taipan?

Dari beberapa nama perusahaan yang mendapat kredit dari dana utangan China, ternyata terdapat nama-nama perusahaan milik Wakil Presiden Jusuf Kalla, Arifin Panigoro dan PT Indah Kiat yang bergerak di sektor pulp dan paper yang sepertinya jauh dari konteks pembangunan infrastruktur.

44 INTERNASIONAL

Suara Boikot Produk Israel dari Jakarta

Indonesia bersikap proaktif dengan menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI, yang khusus membahas isu Palestina, dan mendorong langkah-langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Namun, seberapa efektif langkah itu, masih harus dilihat.

48 LIFE

Keluarga Harus *Aware* pada *Warning Sign* DBD

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat di tahun 2014, terdapat 71.668 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan 641 kematian. Dalam hal ini Indonesia termasuk dalam kategori A (Endemik tinggi) yang berarti penyakit DBD merupakan salah satu alasan utama rawat inap dan salah satu penyebab utama kematian pada anak.

8 LENSA AKTUAL

Taksi Konvensional Vs Taksi Aplikasi



The image displays the Aktual.com website and its mobile application. The website header features the Google logo, the text 'Google play', and a search bar with 'CMN Aktual' entered. Below the header, there's a navigation bar with 'Aplikasi' and 'Berita'. The main content area shows the Aktual.com logo, a rating of 5 stars, and a list of news items. The mobile app interface is shown in the foreground, displaying the same news items on a smartphone screen.

3	Tatap Redaksi	10	Kilas Nasional	32	Kilas Hukum
5	Terkini	12	Kilas Politik	42	Kilas Ekonomi
6	Kaki Hari	16	Kilas Peristiwa	50	Oase

Laksanakan Tugas Operasi di Poso, TNI Investigasi Heli Jatuh

Kepala Pusat penerangan TNI, Mayjen Tatang Sulaiman membenarkan bahwa pada hari Minggu (20/3) sekitar pukul 17.55 wita, telah terjadi musibah jatuhnya helikopter Milik TNI AD jenis Bell 412 EP dengan nomor HA 5171.

Heli jatuh saat sedang melaksanakan tugas operasi perbantuan kepada Polri di Poso Pesisir Selatan, Kab Poso Sulawesi Tengah. Menurutnya, penyebab kecelakaan adalah faktor cuaca. Namun, sedang dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Kronologis kejadian sekitar pukul 17.20 wita helikopter berangkat dari desa Napu menuju Poso. Lalu sekitar pukul 17.55 wita, helikopter berpenumpang 13 orang tersebut jatuh di daerah Kel. Kasiguncu, Kec. Poso Pesisir.

Adapun 13 korban yang sudah ditemukan meninggal dunia maupun masih dalam pencarian adalah sebagai berikut:

1. Inf Saiful Anwar (Danrem 132/Tdl)
2. Inf Heri
3. Inf Ontang Rp
4. Cpm Tedy
5. Inf Faqih
6. Dr. Yanto
7. Kiki
8. Cpn Agung
9. Cpn Wiradi
10. Cpn Tito
11. Karmin
12. Bagus
13. Bangkit

Kemudian, langkah awal yang telah diambil oleh pihak TNI adalah melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban yang dipimpin oleh Pangdam VII/Wirabuwana.

"Sampai saat ini 12 korban telah ditemukan dan 1 orang korban dalam proses pencarian yaitu atas nama Lettu Cpn Wiradi," ujar Tatang di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (20/3).



Ke-12 jenazah korban langsung dievakuasi ke RS Bhayangkara, Palu, untuk diidentifikasi. Lalu pada Senin (21/3) besok, semua korban evakuasi akan dipulangkan ke rumah duka masing-masing.

"Sampai saat ini TNI masih melaksanakan investigasi dalam rangka mengumpulkan informasi jatuhnya helikopter itu," tuturnya.

Karel Stefanus Ratulangi

Menhub Tegaskan Grab Car dan Uber Taksi Ilegal

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, mengatakan angkutan berbasis aplikasi adalah ilegal, karena tidak memenuhi izin pengoperasian transportasi secara resmi.

"Saya sudah katakan ini ilegal, harus dihentikan dulu sambil diproses," katanya di Jakarta, Selasa (22/3).

Untuk itu, Jonan sudah melayangkan surat pengajuan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika beberapa waktu lalu untuk memblokir aplikasi Grab Car dan Uber Taksi untuk sementara, sampai memenuhi izin resmi.

"Saya sudah minta Kemkominfo untuk blokir dulu sambil ini diproses. Akan tetapi, saya enggak tahu pandangan Kominfo, dia (Menkominfo) bilang ini bisa cepat diproses," katanya.

Namun, hingga saat ini Kemenkominfo belum memblokir kedua aplikasi tersebut dan telah membahas terkait dengan badan hukum dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. *Zaenal Arifin*

Jaksa Agung: Penetapan La Nyalla Sebagai Tersangka Sesuai Bukti

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo memastikan penetapan La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim, sesuai bukti-bukti yang dimiliki jaksa.

"Kejaksaan melakukan penegakan hukum secara terukur, tidak mencari-cari," kata Prasetyo saat berkunjung ke kantor Kejari Jombang, Senin (21/3).

Pasca penetapan tersangka oleh kejaksaan, La Nyalla menuding penatapannya sebagai tersangka erat dengan desakan agar mundur dari kuris Ketua PSSI.

"Politik apa? Yang menuding yang mempolitisir, yang menuding yang membawa-bawa ke ranah politik. Saya tekankan kepada masyarakat justru yang bicara itu yang membawa kasus ini ke ranah politik," ujar Prasetyo.

Prasetyo pun tak mempersoalkan kubu La Nyalla melakukan gugatan praperadilan. Dia pun siap menanggapi perlawanan yang dilakukan La Nyalla.

"Soal praperadilan kita hadapi saja. Soal penundaan (pemeriksaan) itu juga tak lazim, tidak ada alasan dasar mereka untuk minta penundaan ketika menghadapi proses hukum." *Wisnu Yusep*





Kabinet Tuna Visi

Perselisihan pendapat antarmenteri di ruang publik membuka watak dasar kabinet koalisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni koalisi kepentingan tanpa visi (ideologi).

Kendati pada titik keberangkatannya, pasangan ini menjanjikan koalisi ramping tanpa syarat dengan konsepsi ideologis yang kental dalam sesanti Nawacita, namun dalam praktiknya jauh panggang dari api. Pemerintahan ini seperti menanggung beban hutang politik yang besar untuk segera dilunasi kepada para “investor” dengan mengakomodasi kaki-tangannya di kabinet.

Akibatnya, yang muncul adalah kabinet gado-gado yang dipersatukan oleh kepentingan pragmatis tanpa kesamaan visi ideologis. Sejak itu, konsepsi ideologi Nawacita tidak menemukan basis institusionalnya untuk bisa diwujudkan dan lekas menjelma sebagai pepesan kosong. Menteri-menteri berhaluan liberal yang ramah kepentingan asing seperti Menteri ESDM dan menteri perdagangan bersanding dengan menteri-menteri berhaluan kedaulatan nasional seperti Menko Kemaritiman dan Menteri Pertanian. Dalam era kebebasan berpendapat dan informasi, konflik laten dalam kabinet ini meledak keluar memanifestasikan konflik terbuka yang membingungkan nalar publik.

Dimensi lain yang menambah potensi konflik dalam kabinet ini adalah kehausan menteri-menterinya untuk mengembangkan politik pencitraan. Obsesi besar untuk merekayasa pencitraan ini mencerminkan menguatnya kesadaran individualistik sebagai

konsekuensi dari merosotnya kewibawaan pusat teladan.

Ketika banyak orang mulai kehilangan kekaguman pada “nama-nama besar”, secara insinktif mereka mengalihkan kekagumannya pada diri sendiri. Banyak menteri yang mematat-matat dirinya sebagai pemimpin besar. Masalahnya, bangkitnya kesadaran individualistik dan kekaguman pada diri sendiri ini tidak didukung oleh kerangka sosialitas yang dapat mengembangkan otonomi dan karakter individu. Dalam lemahnya kepastian hukum dan ekosistem kreativitas, ruang otonomi individu dipersempit oleh keharusan keguyuban. Kebanyakan individu tumbuh dengan mentalitas konformis, bukan subyek berdaulat yang bisa mengambil jarak dari tradisi buruk.

Kumpulan individu-individu guyub tak dapat melahirkan masyarakat kreatif. Kreativitas sosial memerlukan tumbuhnya eksentrisitas. “The amount of eccentricity in a society,” ujar John Stuart Mill, “has generally been proportional to the amount of genius, mental vigor and moral courage it contained.” Bahwa saat ini, Indonesia mengalami defisit orang-orang eksentrik berkarakter yang memiliki kekuatan mental, kebernasan gagasan dan keberanian moral untuk mengambil pilihan sendiri di luar kelatahan dan tekanan luar, merupakan pertanda buruk bagi bangsa ini.

Dalam lemahnya kekuatan karakter, imajinasi dan orisinalitas, obsesi politik sebagai ekspresi pemujaan diri lebih menguatkan semangat komodifikasi yang reseptif dan konsumtif, ketimbang sebagai ekspresi subyek kreatif dan produktif. Dunia politik dan kabinet disesaki ongkongan politikus plastik,

kehebohan aksi selebritas, dan jor-joran pencitraan, tetapi miskin isi, miskin visi, hampa darma.

Perilaku elit politik dan menteri-menteri tersebut sangat menggelisahkan. Berdasarkan pengalaman berbagai negara, yang paling bertanggungjawab atas keruntuhan suatu demokrasi bukanlah orang-orang biasa melainkan perilaku elit politik (Bermeo, 2003). Sumber utama krisis politik di negeri ini tidaklah terletak pada "sisi permintaan" (demand side), seperti sering didalihkan para politisi: rendahnya tingkat pendidikan rakyat, pragmatisme pemilih, dan kurangnya kesadaran politik. Sebaliknya, sumber krisis politik itu berasal dari kelemahan "sisi penawaran" (supply side); dari ketidakmampuan aktor-aktor politik untuk membangkitkan kepercayaan rakyat. Dengan meminjam ungkapan Bung Karno, para pemimpin kita gagal membangkitkan spirit, kehendak, dan perbuatan rakyat.

Politik dan pemerintahan tanpa visi ideologis tak menyediakan basis nilai dan harapan. Dampaknya segera terlihat dalam watak kabinet. Pola koalisi dan oposisi tidak solid. Para pemimpin partai dan menteri-menteri sibuk bermanuver politik secara zig-zag, tanpa beban berganti-ganti posisi etis. Partai-partai yang bercorak liberal rela bersanding dengan partai-partai bercorak illiberal. Rujukan koalisi bukanlah titik temu dalam nilai dan visi, melainkan semata-mata berdasarkan alokasi sumberdaya dan kursi. Platform yang disusun secara serabutan diajukan sekadar alat justifikasi.

Tanpa kejelasan visi, politik kehilangan peta jalan ke arah mana masyarakat akan diarahkan, prioritas nasional apa yang akan dipilih, fokus pembangunan apa yang akan disasar, dan akhirnya pengorbanan apa yang dituntut dari rakyat. Politik tanpa visi sekadar kemeriahan pesta pora yang menyesatkan; memberi harapan semu dengan biaya mahal, tanpa arah ke depan, tanpa perenungan mendalam, dan tanpa komitmen

pada penyelesaian masalah-masalah mendasar.

Tetapi ada luapan bawah sadar yang mencerminkan kejenuhan banyak orang dengan politik permukaan dan mulai berpaling ke politik pendalaman. Meski untuk sementara waktu, bagi kebanyakan rakyat yang dibelit kesulitan hidup, perhatian pada segi-segi pendalaman-struktural ini masih bisa terpalingskan oleh godaan stimulasi permukaan-inkremental. Tendensi ini bisa dilihat dari kecenderungan figur politik yang di awal era reformasi menjadi pesakitan, sekarang diperlakukan bak pahlawan, karena kekecewaan publik kritis terhadap figur lain yang berpopularitas tinggi tetapi tak menjanjikan pendalaman.

Pada tingkat yang lebih bernalar, kita juga bisa melihat adanya arus besar kesadaran publik untuk merestorasi rancang bangun kenegaraan yang sejalan dengan basis sosial dan kepribadian bangsa. Salah satu indikasi dari kesadaran ini adalah mencuatnya kehendak publik untuk memulihkan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang dirumuskan dan ditetapkan kembali oleh seluruh kekuatan rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Untuk mengantisipasi ekspektasi publik pada substansi demokrasi, tantangan politik ke depan bagaimana mengembangkan pendalaman visi sambil mengendalikan potensi pertikaian dalam politik. Dalam kaitan ini, ada postulat demokrasi yang harus diikuti. Bahwa bila ada masalah dalam demokrasi, solusinya bukanlah dengan jalan menguranginya, melainkan justru dengan jalan menambahnya agar lebih demokratis.

Untuk itu, perlu ada proses pendalaman dan perluasan demokrasi. Pendalaman demokrasi diarahkan untuk menyempurnakan institusi-institusi demokrasi agar lebih sesuai dengan tuntutan kepatutan etis, lebih responsif terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat; mengurangi sifat narsisme politik yang hanya melayani segelintir elit politik. Sementara perluasan

demokrasi diarahkan agar institusi demokrasi dan kebijakan politik punya dampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kesenjangan sosial yang dapat melumpuhkan demokrasi.

Pintu masuk ke arah itu bisa dimulai lewat penataan kerangka koalisi. Pembentukan koalisi tidak hanya berdasarkan pertemuan kepentingan, atau segi-segi sentimentil dalam relasi antar elit, melainkan berbasis komitmen bersama dalam kerangka nilai dan visi. Dalam kerangka ini, kompetisi politik bukanlah sekadar pertarungan popularitas figur, melainkan pertarungan dalam pasar gagasan. Jika visi yang dipertaruhkan, para kandidat tak perlu merasa kecil atau tinggi hati. Mereka perlu menghayati dirinya sebagai pahlawan yang memperjuangkan nilai luhur apapun risikonya. Jika visi ini secara jujur diperjuangkan dengan kemampuan komunikasi politik yang bersambung dengan pemahaman publik, rakyat punya kepekaan nuraninya tersendiri. Sekalipun kalah, secara moral menang.

"Kontestasi politik," ujar Winston Churchill, "sama bahayanya dengan peperangan, bahkan lebih berbahaya. Dalam peperangan, orang hanya bisa mati satu kali; sedang dalam kontestasi politik, orang bisa saja mati berkali-kali".

Kematian politik selalu menyisakan harapan hidup dan menghidupkan. Bagi si pecundang, kekalahan bisa saja kemenangan yang tertunda. Bagi si pemenang, pihak yang kalah menghadirkan tekanan yang bisa membangkitkan kreativitas daya hidup. Dalam demokrasi yang bervisi, pihak-pihak yang kalah tidak harus mencari kehormatan dengan harga murah kepada sang (calon) pemenang. Mengonsolidasikan diri sebagai oposisi untuk mempersiapkan kemenangan esok hari jauh lebih terhormat.

Demokrasi adalah kemenangan semua pihak. Yang menang dan yang kalah punya perannya sendiri, punya ruang kehormatannya sendiri-sendiri. Semuanya bekerja untuk tuan yang sama: sang demos (rakyat). ◦



LENSA AKTUAL

TAKSI KONVENSIONAL VS TAKSI APLIKASI

Pengemudi ojek online merusak sebuah taksi Blue Bird di kawasan Karet, Jakarta Pusat, Selasa (22/3). Peristiwa tersebut terjadi setelah bentrok antara pengemudi taksi dengan pengemudi ojek berbasis online di sejumlah titik di Jakarta saat berlangsungnya aksi ribuan sopir tolak transportasi umum berbasis aplikasi.

Tino Oktaviano - Aktual





Ahok Tidak Setuju Aplikasi Grab Car dan Uber Taksi Ditutup

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku tidak setuju aplikasi angkutan umum Grab Car dan Uber Taksi ditutup. Ahok justru meminta aturannya yang harus dibuat lebih jelas dan tegas.

“Jadi, bukannya malah meminta supaya aplikasi-aplikasi itu dihapus, tetapi justru peraturannya yang harus diperjelas dan dipertegas. Sejak awal, saya tidak melarang keberadaan aplikasi,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (22/3).

Ahok menilai, perkembangan teknologi, termasuk teknologi aplikasi online atau daring untuk layanan transportasi tidak dapat dicegah.

“Di zaman sekarang ini, pertumbuhan teknologi aplikasi sulit dihindari. Apalagi masyarakat juga banyak yang pakai aplikasi, misalnya saja penggunaan WhatsApp Messenger maupun BlackBerry Messenger yang sudah mulai menggantikan pesan singkat (SMS),” katanya.

Sebelumnya, Menteri

Perhubungan Ignatius Jonan, mengatakan aplikasi online untuk angkutan umum, ilegal karena tidak memenuhi izin pengoperasian transportasi secara resmi.

“Saya sudah katakan ini ilegal, harus dihentikan dulu sambil diproses,” katanya di Jakarta, Selasa (22/3).

Untuk itu, Jonan sudah melayangkan surat pengajuan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika beberapa waktu lalu untuk memblokir aplikasi Grab Car dan Uber Taksi untuk sementara, sampai memenuhi izin resmi.

“Saya sudah minta Kemkominfo untuk blokir dulu sambil ini diproses. Akan tetapi, saya enggak tahu pandangan Kominfo, dia (Menkominfo) bilang ini bisa cepat diproses,” katanya.

Namun, hingga saat ini Kemenkominfo belum memblokir kedua aplikasi tersebut dan telah membahas terkait dengan badan hukum dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. /Zaenal Arifin

Taksi dan Gojek Tawuran di Sudirman, Merasa Diadudomba Pemerintah

Ratusan pengemudi taksi dan Gojek terlibat tawuran di kawasan Jalan Sudirman tidak jauh dari Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (22/3). Dalam bentrokan tersebut, kedua kubu saling melempar batu.

Berdasarkan informasi yang diterima Aktual.com, bentrokan tersebut bermula saat ratusan pengemudi Gojek merasa tidak terima dengan aksi *sweeping* yang dilakukan sopir taksi pagi tadi terhadap pengemudi Gojek. Karena dasar itu, para pengemudi Go-Jek melakukan upaya serangan balik terhadap pengemudi taksi. Ratusan pengemudi gojek juga melempari sopir taksi dengan batu dan kayu.

“Maju, maju, kejar sopir taksi yang *sweeping*,” ucapnya meniru pengemudi Go-Jek yang tengah kelahi, Jakarta, Selasa (22/3)

Meski diserang, para sopir taksi tidak lari, justru mereka semakin maju menantang pengemudi Go-Jek. Mereka melakukan serangan balasan. Pecalah tawuran di Jalan Sudirman tersebut antara sesama sopir yang notabene sama-sama mencari makan di jalan.

Salah seorang sopir taksi yang Aktual.com temui di Medan Merdeka Barat, Hartomo mengatakan, dirinya menyangkan peristiwa tersebut. Pasalnya, mereka saling serang sesama orang susah. “Ini gara-gara menteri Rudy (kominfo) gak tegas. Kita diadu domba. Kita sama-sama nyari makan jadi nyari musuh,” ucapnya marah. /M Vidia Wirawan



Ahmad Dhani: Ahok Ini Patuhnya ke Konglomerat, Bukan Rakyat



Bakal calon gubernur dari PKB, Ahmad Dhani menganggap mengalahkan bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI 2017 nanti adalah sebuah keniscayaan. Pasalnya dia menilai Ahok punya kekuatan pendukung luar biasa kuat. Sehingga secara teknis tidak ada seorang pun yang kemungkinan

bisa mengalahkan Ahok.

Namun kalimat pentolan band Dewa 19 tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan pernyataannya dengan menyebut yang kuat bukan Ahok, tapi yang ada di belakangnya. Yakni tidak lain para pemodal besar atau konglomerat.

Dengan dukungan dana besar dari pemodal, Ahok pun berani mencalonkan diri lewat jalur perseorangan dengan tidak mengindahkan aturan partai. Sebab menurut Dhani, Ahok memang tidak mau diatur-atur partai. “Maunya diatur oleh konglomerat,” kata dia, saat gelar konferensi pers di kediamannya di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin (21/3).

Karena hanya patuh ke konglomerat, lanjut Dhani coba menganalisa, jika kembali terpilih memimpin DKI Jakarta tentunya kebijakan yang dibuat Ahok pun hanya akan menguntungkan kaum

pemodal. “Ahok ini mendukung konglomerat, tidak mendukung rakyat,” ujar dia.

Dhani melanjutkan, kaum pemodal yang mendukung Ahok inilah yang dapat menjadikan Ahok dengan mudah memantapkan kursi DKI 1 untuk kedua kali. “Mereka bisa membeli hukum, bahkan membeli KPU,” tuding dia.

Kendati anggap Ahok sulit dikalahkan, Dhani tetap mendukung para calon-calon yang tetap memilih maju bertarung di Pilkada DKI. Bahkan menurut dia, mereka-mereka yang maju nanti merupakan orang-orang yang ingin mempertahankan tanah air dari cengkeraman asing.

“Tanah Nusantara ini adalah warisan nenek moyang kita, leluhur kita. Mereka yang dulu di Majapahit, Mataram, Pajajaran, Siliwangi, Demak, Sriwijaya, Mulawarman. Jadi tidak ada yang sia-sia kalau mereka berjuang,” pungkasnya. /M Vidia Wirawan

Bolehkan TemanAhok di Aset DKI, Apa Kabar ‘Bersih Transparan Profesional’?

Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dikritisi, lantaran membiarkan relawan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, TemanAhok, menduduki aset Pemprov DKI di kompleks DPRD DKI, Graha Pejaten No. 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

“Ini kontradiktif dengan yang digaungkan bersih, transparan, dan profesional,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik, di Jakarta, Senin (21/3).

Ketua DPD Gerindra DKI ini menilai secara etika politik digunakannya aset milik negara untuk kepentingan politik praktis tidak bisa dibenarkan. Karenanya dia menyarankan TemanAhok menyewa tempat lain yang dikelola swasta sebagai markasnya. “Kalau beretika, sewa ya di Menteng, Thamrin City, dan sebagainya,” ucap dia. Taufik pun meminta Pansus Aset untuk menelusuri status kantor TemanAhok tersebut.

Sebelumnya, Center For Local



Government Reform (CELGOR) menilai Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersikap timpang membolehkan TemanAhok menempati aset negara di di Graha Pejaten IV, Nomor 3, Jakarta Selatan sebagai kantor sekretariat. Sedangkan dengan alasan yang sama, Ahok mengusir paksa warga Jakarta yang dianggap menduduki area yang juga dianggap aset negara.

“Jangan terbang pilih dong Ahok. Ketika masyarakat menduduki tanah yang dianggap aset negara seperti Kampung Pulo, Kalojodo, Bukit Duri diusir oleh Ahok. Padahal warga sebagian besar mengantongi surat-surat dan bayar pajak juga. Giliran TemanAhok kok malah enteng saja

Ahok bilang legal,” kata Direktur Eksekutif Celgor, Budi Mulyawan, saat dihubungi Aktual.com, Minggu (20/3).

Kalaupun Ahok menyebut TemanAhok menduduki aset negara itu dengan legal karena menyewa dari penyewa sebelumnya, Celgor mendesak transparansi atas sewa itu. “Dia (TemanAhok) kontrak sama siapa? Besarnya kontrak berapa? Masuknya ke kas negara bukan? Siapa yang bayar? Siapa yang perintah dan perbolehkan pakai gedung itu?” rentet Budi pertanyaan alasan legalitas keberadaan TemanAhok di sana.

Celgor juga mendesak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera membeberkan secara transparan status penggunaan gedung itu ke TemanAhok. Mengingat saat ini Ketua BPKAD Heru Budi Hartono digaet Ahok sebagai bakal calon wakil gubernur untuk Pilkada DKI melalui jalur perseorangan yang didukung TemanAhok. /M Vidia Wirawan

Menlu: Tiongkok Harus Hormati Hukum Laut Internasional

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi meminta Tiongkok untuk menghormati hukum internasional, termasuk kesepakatan dalam konvensi laut internasional, pascainsiden penggalangan penyitaan KM Kway Fey 10078 berbendera Tiongkok di Laut Natuna.

“Kita dengan Tiongkok memiliki hubungan yang baik. Kita mencoba agar hubungan baik itu sekaligus dapat digunakan untuk menghormati hukum-hukum internasional, sekali lagi termasuk hukum Unclos 1982,” tegas Menlu ditemui di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin (21/3).

Menurut Menlu, pihaknya telah memanggil Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Sun Weide, untuk menyampaikan fakta lapangan mengenai penggalangan penangkapan oleh sejumlah kapal “coast guard” Tiongkok.

Dalam pertemuannya dengan Weide, Menlu mengatakan Indonesia menyampaikan tiga bentuk protes yang pertama masalah pelanggaran



hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen.

Protes kedua yaitu upaya yang dilakukan oleh kapal “coast guard” Tiongkok untuk mencegah upaya penegakan hukum yang dilakukan otoritas Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen.

Selanjutnya, protes ketiga yang disampaikan adalah pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia.

Menlu menekankan kepada Weide bahwa Indonesia merupakan negara “Non Claimant State” atau negara

yang tidak merasa memiliki dan mengakui sesuatu yang diperebutkan di wilayah Laut Cina Selatan.

“Jadi sudah jelas dan kami minta agar Tiongkok memberikan klarifikasi terhadap insiden yang terjadi pada Minggu dini hari,” tegas Menlu.

Sebelumnya, otoritas Tiongkok melakukan intervensi saat kapal milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) KP Hiu 11 melakukan penegakan hukum kepada KM Kway Fey 10078 yang diduga melakukan tindak pencurian ikan di wilayah perairan Kepulauan Natuna, Indonesia.

Saat KM Kway Fey akan dibawa petugas KKP, tiba-tiba kapal “coastguard” Tiongkok datang mendekat dan menabrak Kway Fey, dengan dugaan agar kapal ikan asal Tiongkok tersebut tidak bisa dibawa ke daratan Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan meski kejadian itu ada di wilayah perbatasan, namun KM Kway Fey dinyatakan telah berada di ZEE Indonesia. /Wahyu Romadhoni

Ada Saham Lippo Group di Grab, Alasan Jokowi Tak Berani Tutup Angkutan Online?



Angkutan Umum berbasis Online, Grab yang hari ini Selasa (22/3) didemo besar-besaran oleh Supir Angkutan Umum Konvensional karena dianggap ilegal, kemarin Senin (22/3) mengumumkan bahwa mereka telah melakukan kerja sama strategis dengan Lippo Group.

Lippo Group adalah salah satu konglomerasi di Indonesia karena kepemilikan sejumlah ritel, mall, bank, media masa, sekolah,

pemakaman, dan rumah sakit ternama yang tersebar di kota-kota besar di tanah air.

Seperti dikutip dari Tech in Asia, hubungan antara Grab dan Lippo Group ini bukanlah kali pertama yang dilakukan. Karena berdasarkan laporan, Lippo Group ternyata merupakan salah satu investor awal dari Grab.

Direktur Lippo Group, John Riady mengakui bahwa Venturra Capital milik Lippo Group, memiliki sejumlah saham di Grab. Nilai investasi VC, dalam hal ini Lippo Group berada di dalamnya, sebesar 100 juta dollar AS.

Investasi ini sebelumnya dirahasiakan, kemungkinan terkait dengan status Grab yang selama ini belum jelas, hingga belakangan ditegaskan melalui keharusan membentuk koperasi.

Lippo Group berencana akan memanfaatkan “keahlian transportasi dan pengiriman” milik Grab.

Artinya Lippo akan memanfaatkan jaringan transportasi milik Grab untuk mendukung situs e-commerce miliknya, MatahariMall.

Di Asia Tenggara, layanan GrabTaxi merupakan saingan berat dari aplikasi *booking* mobil asal AS, UBER. Sedangkan di Indonesia, GrabBike bersaing ketat dengan aplikasi *booking* khusus roda dua GO-JEK.

Kuat dugaan pemerintah tidak berani tegas terhadap Angkutan Transportasi Online, karena kepemilikan saham konglomerasi besar di dalamnya.

Desas-desus mengabarkan, Lippo Group adalah perusahaan yang mendanai kampanye politik Jokowi-JK saat Pilpres 2014. /Arbie Marwan

SBY: Pak Jokowi Kita Jangan Mau Diprovokasi!

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa alasan terhentinya proyek Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Desa Hambalang, Bogor, Jawa Barat, bisa dipertanggungjawabkan. SBY menyatakan demikian sejalan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Hambalang.

“Sejumlah pihak tak senang dengan ‘SBY Tour de Java’, bahkan katanya safari tersebut dihancurkan Presiden Jokowi yang datang ke Hambalang. Alasan terhentinya pembangunan proyek Hambalang (Pak Jokowi bilang ‘mangkrak’) sangat jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas SBY



dalam akun twitter pribadinya @SBYudhoyono, Senin (21/3).

Diungkapkan SBY, waktu Menteri Pemuda dan Olahraga dijabat Roy Suryo sempat berencana melanjutkan proyek tersebut. Hanya saja, anggarannya ditahan oleh DPR dan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengizinkan proyek tersebut dilanjutkan.

Sebab itu, jika setelah melihat langsung kondisi proyek Hambalang, Presiden Jokowi ingin melanjutkan proyek tersebut, SBY merasa senang dan mendukung penuh.

“Menpora Roy Suryo (waktu itu) berencana melanjutkan pembangunan Hambalang, tetapi anggaran ‘ditahan’ DPR & KPK tak izinkan. Jika Pak Jokowi ingin lanjutkan proyek Hambalang, saya senang & dukung penuh. Dulu saya juga tuntaskan banyak proyek yang

belum selesai,” jelas SBY.

SBY tidak percaya mengenai anggapan kunjungan Presiden ke Hambalang menghancurkan Tour de Java yang dilakukannya. Sebab dirinya bertemu dengan kader dan rakyat, sehingga tidak ada yang dihancurkan.

“Aspirasi rakyat (yang muncul dalam Tour de Java SBY) bukan untuk dihancurkan, justru harus didengar. Bukankah pemimpin mesti mendengar?. Suara kader Demokrat (yang juga saya terima dalam Tour de Java) adalah hak & kedaulatan partai kami. Tak ada yang boleh mencampuri,” cuitnya.

“Itulah tujuan, kegiatan & hasil SBY Tour de Java. Kenapa harus kebakaran jenggot? Lagipula tak ada hukum yang dilanggar. Pak Jokowi, teruslah emban amanah & bekerja hingga tahun 2019. Jangan mau kita diprovokasi & diadudomba. Semoga sukses,” sambung SBY. /Wahyu Romadhoni

Jalan Kaki Jambi-Jakarta, Petani Suku Anak Dalam Tagih Janji Jokowi

Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD) mendesak pemerintah membentuk Komite Nasional Penyelesaian Konflik Agraria. Komite ini sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 33 UUD 1945, dalam menyelesaikan berbagai konflik agraria di seantero Indonesia.

Merujuk data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada tahun 2015 terjadi 252 kasus konflik agraria di Indonesia dan menyeret 108.714 keluarga. Jika diakumulasi dalam satu dekade terakhir telah terjadi 1.772 konflik agraria pada luasan wilayah 6.942.381 hektar yang melibatkan 1.085.817 keluarga.

“Artinya, dalam dua hari sekali terjadi konflik agraria di Indonesia,” tegas Alif Kamal dari KPP PRD dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/3).

Diungkapkan dia, konflik agraria dipicu oleh kebijakan agraria pemerintah yang sangat pro-investasi. Tercatat ada puluhan

produk Undang-Undang (UU) yang membukakan jalan bagi swasta untuk menguasai tanah dan sumber daya alam.

“Inilah yang menyebabkan maraknya praktek perampasan tanah dan sumber daya milik rakyat oleh korporasi, baik domestik maupun asing,” jelasnya.

Kondisi ini disebutnya sebagai darurat agraria. Sebab struktur kepemilikan tanah yang makin timpang. Indeks gini kepemilikan tanah di Indonesia sudah mencapai 0,72. Lalu, menurut BPN, hanya 0,2 persen penduduk negeri ini menguasai 56 persen aset nasional yang sebagian besar dalam bentuk tanah.

Sementara itu, 85 persen rumah tangga petani di Indonesia adalah petani gurem dan petani tak bertanah. Kebijakan liberalisasi agraria itu jelas bertolak belakang dengan semangat konstitusi kita sebagaimana diatur Pasal 33 UUD 1945. Bahwa bumi, air dan kekayaan

yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Petani berharap, Presiden Joko Widodo bisa menuntaskan persoalan konflik agraria ini. Apalagi, pada saat kampanye Pilpres lalu, Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan konflik agraria di Indonesia,” ucap Akmal.

Sebelumnya, Akmal mengungkapkan bahwa ribuan petani dari sejumlah kabupaten di Jambi akan menggelar aksi ke Jakarta dengan jalan kaki, Kamis (17/3) besok. Mereka akan berjalan kaki dengan jarak tempuh kurang lebih 1000 kilometer.

Ribuan petani yang turun ke jalan tersebut merupakan perwakilan dari petani-petani yang tercekik konflik agraria di Jambi seperti Suku Anak Dalam dan petani Dusun Mekar Jaya (Sarolangun), petani Kunangan Jaya I dan Kunangan Jaya II (Batanghari) serta petani dari Tanjung Jabung Timur. /Karel Stefanus Ratulangi

'Tiki-Taka' Pemilukada DKI Jakarta 2017

Dinamika politik DKI Jakarta akhir-akhir ini semakin menguat. Apalagi terkait dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta 2017. Banyak opini dan diskusi mulai merambah masyarakat Ibu Kota ini, tidak terkecuali di kantor penulis.

Ya, opini dan diskusi ini mengarah kepada peluang petahana (*incumbent*) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan kandidat penantangannya. Memang, Ahok sementara ini secara nyata belum memiliki penantang yang kuat secara popularitas. Padahal, faktor utama yang bisa mengalahkan Ahok adalah popularitas.

Terbukti, dari hasil pelbagai lembaga survei tentang popularitas memang sementara ini menempatkan Ahok itu dalam posisi pertama.

Meski demikian, kandidat penantang Ahok tak perlu takut dan risau, karena figur Ahok tidak sekuat yang dicitrakan di media massa maupun media sosial. CEO PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah mengatakan "Ada jarak antara elektabilitas dan popularitas yang sangat jauh."

Bagi penulis, pernyataan Eep seakan membuka angin segar dalam perpolitikan DKI Jakarta. Tak hanya itu pernyataan Eep seolah membuka kotak pandora lembaga survei yang sementara ini masih mengunggulkan Ahok.

Tak hanya itu, pernyataan Eep juga bisa membuat reda atau setidaknya menetralkan pernyataan sejumlah pengamat dan tokoh lainnya bahwa Ahok terkesan seperti 'dewa' atau lawan yang tiada tandingan dan seakan Ahok bakal menang mudah siapa pun lawannya



BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK)

Pencapaian Selama Menjadi Gubernur DKI

1 Peringkat ke-18

dalam penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi yang diadakan Kemenpan RB pada 2014.

2 67%

serapan anggaran dari APBD 2015

3 Tersangkut Kasus

Sumber Waras (potensi kerugian Rp 191 miliar)

Izin reklamasi pulau di Pantai Utara Jakarta yang menguntungkan perusahaan properti tertentu

4 Penggusuran Kasar

Kampung Pulo Kali Jodo

di Pemilukada DKI.

Sayang, pernyataan itu banyak pula disanggah dan bahkan mencibir Eep. Perlu digarisbawahi, bahwa Eep adalah salah satu 'otak' kemenangan pasangan Jokowi-Ahok di Pemilukada DKI 2012 dan Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014.

Mari bicara soal Ahok lagi, secara popularitas Ahok jauh meninggalkan lawan politiknya. Hal itu didasari bahwa Ahok adalah media darling meskipun selalu mengeluarkan komentar pedas bahkan kasar. Bahkan untuk menjaga citranya, Ahok selalu marah dan mengancam anak buahnya setiap hari, Ahok seolah menjaga ritme kerja. Ahok tidak segan memecat bawahannya dan melakukan bongkar pasang birokrasi sesuai seleranya. Hal inilah membuat Ahok ter-*framing* seolah sosok tegas dan kontroversial.

Kesemuanya itu, ada celah dan catatan menarik yang perlu disorot pada sosok Ahok ini. Apakah itu? Satu-satu cara untuk menguliti sosok Ahok tanpa menimbulkan perdebatan yakni mengupas habis kinerjanya sejak menjabat sebagai gubernur DKI menggantikan Jokowi yang menjadi presiden ke-7 RI pada 20 Oktober 2014. Nah, dengan beginilah penilaian terhadap Ahok bisa

dikatakan objektif dan pakai data, tidak asal kritik. Kalau kita berdebat soal sosok Ahok, entah ia dikenal jujur, tegas, antikorupsi, kasar, atau gemar menyalahkan bawahan, penilaian itu jelas subjektif.

Coba kita tengok, apakah kinerja pemerintahan DKI Jakarta berjalan dengan baik sejak dipimpin Ahok? Pertama, mengacu pada Pemprov DKI hanya menduduki peringkat ke-18 dengan nilai 58,57 atau mendapat predikat CC dalam penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi yang diadakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) 2014.

Nilai itu jauh dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur dan Yogyakarta yang menduduki urutan 1 dan 2 dengan mendapat predikat A yang masing-masing meraih nilai 80,68 dan 80,04. Sedangkan Pemprov Jawa Tengah dan Pemprov Jawa Barat masing-masing mendapat predikat BB dengan nilai 72,09 dan 70,06.

Terbukti, dari data yang dikeluarkan Kemenpan RB ini bahwa reformasi birokrasi dan transparansi yang selama ini didengungkan Ahok ternyata baru sebatas wacana. Kemudian dengan bongkar pasang

birokrasi yang ditempuhnya belum membuahkan hasil menggembirakan. Apalagi kesan dia soal keberaniannya membongkar mafia anggaran hanya sebatas pernyataan manis. Ironisnya, Ahok kalah telak dibandingkan Wali Kota Ridwan Kamil (Emil) yang menempatkan Bandung di posisi pertama tata kelola pemerintahan versi Kemenpan RB.

Lalu kedua, kita berbicara soal serapan anggaran. Dalam APBD DKI versi Kemendagri, pada tahun 2014, anggaran DKI sebesar Rp 72 triliun hanya terserap tak sampai 40 persen atau terendah sepanjang sejarah. Dan kemudian pada APBD 2015 anggaran sebanyak Rp 73,08 triliun hanya terserap sekitar 67 persen. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya bisa melaju kencang malah terhambat.

Namun, Ahok berkilah bahwa pembangunan tetap berjalan meskipun tanpa perlu gunakan dana APBD, lalu dana apa yang dipakai Ahok? Mengutip pernyataan Ahok, banyak peran pengembang dalam membangun Ibu Kota.

Bahkan, lanjut dia, tak sedikit program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang merupakan program *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan swasta. Ini perlu kita kritisi. Karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar CSR. Sebab, pembentukan tersebut dipaksa oleh gubernur, wali kota atau bupati. Kemudian para pengusaha ini mengeluarkan dana CSR adakah maksud tujuan tertentu yang diharapkan kepada gubernur, wali kota atau bupati?.

Kembali soal APBD, Presiden Jokowi pernah mengancam menjatuhkan sanksi bagi kepala daerah yang serapan anggarannya rendah. pada awal 2016, Jokowi juga membanggakan realisasi penggunaan APBN 2015 pada posisi 91,2 persen atau lebih tinggi dari perkiraan pengamat soal serapan anggaran di kisaran 80 persen.

Ketiga, ada beberapa kasus menarik perlu menjadi catatan kinerja Ahok selama ini dan bisa

membuka tabir Ahok sendiri. Seperti kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang menyebabkan potensi kerugian negara versi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 191 miliar. Kemudian izin reklamasi pulau di Pantai Utara Jakarta yang terlihat menguntungkan perusahaan properti tertentu.

Keempat soal pengusuran warga, cara Ahok lebih kasar atau bisa disebut tidak manusiawi jika dibandingkan dengan Jokowi saat menjadi gubernur DKI Jakarta.

Ingat peristiwa relokasi warga di Kampung Pulo mirip dengan pemindahan warga di bantaran Waduk Pluit di masa Gubernur Jakarta Jokowi. Awalnya niat Jokowi merelokasi warga juga mendapatkan perlawanan.

Namun, Jokowi menggunakan jurus andalannya untuk meluluhkan hati warga. Jokowi mengundang warga Waduk Pluit dalam jamuan santap siang di Balai Kota Jakarta.

Namun apa yang dilakukan Ahok saat mengusir Kampung Pulo dan terakhir Kalijodo. Kekuatan militer dan polisi lebih ditonjolkan oleh Ahok. Hal ini membuat warga merasa terintimidasi.

Hasilnya, warga dengan sukarela pindah ke rumah susun yang disediakan oleh Pemprov DKI. Waduk Pluit pun kini menjadi asri

Dengan terungkapnya fakta tersebut pencapaian Ahok selama menjadi gubernur DKI sebenarnya tidak terlalu mengesankan, meski ada juga prestasinya yang tak sedikit.

Strategi Tepat Kalahkan Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ataupun Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang baru menjalani periode kedua pemerintahannya setelah memenangkan pilkada serentak 2015. Karena kebetulan juga mereka kepala daerah populer yang dianggap sukses membangun wilayahnya.

Namun berbeda dengan Emil Lukada DKI 2017, meskipun

Ahok sebagai petahana yang sementara ini diunggulkan, calon lawan Ahok masih melihat celah peluang untuk bisa menang. Namun harus dengan strategi yang tepat diusung penantang Ahok.

Ahok naik menjadi gubernur DKI merupakan nasib dia yang baik, karena Jokowi naik menjadi presiden RI. Lalu Ahok belum teruji seperti Risma dan Anas yang sudah dua kali menang di pesta demokrasi.

Dengan masih adanya waktu sebelum Pemilu DKI dihelat pada April 2017, pendukung Ahok selalu mensosialisasikan bahwa sosok mantan Bupati Belitung Timur ini adalah tegas dan tanpa kompromi, bukan menonjolkan prestasinya. Karena prestasi yang diukir Ahok dapat diperdebatkan.

Sementara itu Ahok juga dibesarkan karena di-*back up* media yang sangat gencar memberitakannya siang dan malam tanpa henti. Meski isi beritanya (maaf) soal 'cangkem' saja.

Kemudian, kalau jeli, calon penantang Ahok jangan lagi memainkan isu agama meski pendukung Ahok pada kenyataannya juga ikut memainkan isu tersebut. Menurut penulis, kandidat lawan Ahok hanya perlu menunjukkan bahwa kinerja petahana selama ini tidak bagus-bagus amat.

Dengan memanaskan suhu politik menjelang Pemilu DKI Jakarta 2017, penulis berharap tidak ada polarisasi yang kuat melebihi pilpres 2014, meski tanda-tanda itu sudah mulai tampak. Kandidat penantang bisa menang tanpa perlu memainkan isu SARA.

Penulis mengibaratkan, Ahok itu seperti 'virus' yang kebal dengan 'imun' kalau tidak 'dimatikan' maka 'Virus' akan semakin 'menggerogoti'. Walaupun kita harus siap terima kenyataan nanti Ahok terpilih menjadi gubernur DKI periode 2017-2022, kalau penantang tidak cerdas mengolah isu. Penantang Ahok harus bisa bermain cantik seperti irama permainan bola 'Tiki-taka' ala Barcelona. ● Sukardjito

Sengketa Laut, Mahasiswa Timor Leste Serbu Kedubes Australia di Jakarta

Sejumlah mahasiswa asal Timor Leste yang menamakan diri Klibur Estudiante Timor Leste (Keustil) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/3).

Dalam aksi yang diawali dengan *longmarch* dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menuntut Australia untuk hengkang dari laut Timor Leste.

Koordinator aksi, Nelson Pereira, menyebutkan saat ini Australia telah mengeksploitasi kandungan minyak di laut Timor Leste secara ilegal.

"Kita menuntut Australi karena mensabotase perbatasan laut kita dan mengambil oil dari wilayah Timor Leste," ucap Nelson kepada Aktual.com, Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Kuningan, Jakarta



Selatan, Kamis (24/3).

Nelson menceritakan, sejak 1971 Australia sudah melakukan perundingan ilegal bersama Indonesia untuk wilayah maritim yang disebut Celah Timor (Timor Gap) tanpa pernah mengajak rakyat Timor (Timor Leste).

"Hasil perundingan yang dijalankan pada November 1973, Australi mendapatkan keuntungan paling besar dari perundingan tersebut," jelasnya.

Namun, kendati sudah ada referendum pada 30 Agustus 1999, Australia tetap menggunakan

kesepakatan batas maritim dengan Indonesia tahun 1971 dan 1972 tidak serta merta menentukan batas maritim yang baru, "Maka dari itu, kesepakatan yang tetap dijalankan hingga saat ini sesungguhnya ilegal," tegas Nelson.

Mengenai eksploitasi minyak, Nelson menuturkan, ladang minyak Laminaria-Carollina dieksploitasi lebih dari 100 juta barel oleh Woodside Australian Petroleum, BHP dan Shell.

"Pemerintah Australia mendapatkan keuntungan USD 900 juta tanpa pernah dinikmati orang Timor. Dan cadangan minyak ini hampir habis," tuturnya.

Oleh sebab itu, Nelson menantang Australia untuk membuktikan dirinya sebagai negara besar yang katanya siap membantu negara-negara berkembang di Asia Pasifik tanpa syarat dan niat buruk.

"Jadilah negara yang berlapang dada, jangan menjadi negara munafik," tukasnya. /Sukardjito

Sejahterakan Masyarakat, Ini Tiga Program Unggulan dari Wali Kota Bontang

Pada Rabu (23/03) Kota Bontang, Kalimantan Timur resmi memiliki Wali Kota dan Wakil Wali Kota baru yaitu pasangan dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. OG dan Basri Rase yang akan menjabat selama lima tahun yakni 2016-2021. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, oleh Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak.

Mantan Anggota DPR RI dari fraksi Golkar ini memaparkan beberapa program unggulan yang telah diwacanakan saat Pilkada berlangsung. Dan, menurut ia, hal pertama sebelum menjalankan visi misi yakni menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

"Sebelum merealisasikan visi misi kita, langkah pertama adalah menyusun RPJMD, karena dalam RPJMD kota Bontang inilah, baru masuk visi misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat," ujar Hj Neni usai pelantikan

Ia juga mengungkapkan, tiga



program unggulan yang akan dicanangkan di Kota Bontang. Yaitu, Bontang Smart, Bontang Green dan Bontang Kreatif.

Dalam hal pendidikan, Hj Neni mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan mempersulit anak-anak Bontang dalam meraih beasiswa. Hal itu dilakukan Neni demi mencerdaskan anak-anak di Kota Bontang.

"Untuk mencerdaskan anak Bontang ke depan adalah kita memberikan fasilitas mempermudah beasiswa tanpa harus menyertai surat keterangan miskin. Siapa pun yang

memiliki otak cerdas, kita tidak akan mempersulit untuk dapatkan beasiswa," jelas Neni menambahkan.

Tak hanya itu, dokter Neni kembali mengungkapkan akan membagikan baju, sepatu dan tas gratis kepada siswa sekolah negeri maupun swasta di kota Bontang.

Selain soal pendidikan, Neni menuturkan, akan membenahi sistem pelayanan kesehatan dalam hal ini BPJS yang sering kali menuai keluhan di masyarakat.

"Kesehatan semua akan kami asuransikan karena untuk membedakan yang miskin dan mampu itu tidak mudah, karena itu bagi masyarakat yang ingin menikmati pelayanan kesehatan di Kota Bontang sesuai dengan UU kita tingkatkan dengan BPJS dalam tanda kutip kita akan mengawali ini supaya mengurangi keluhan mengenai pelayanan kesehatan yang menggunakan BPJS di kota Bontang," terang Neni menutup pembicaraan. /Ferro Maulana

or : AJ 206/1/1 PHB 2016
fikasi : Penting
piran :
nal : Permohonan pemblokiran
aplikasi pemesanan angkutan
(UBER TAKSI dan GRAB CAR)

Jakarta , 14 Maret 2016

Kepada

Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika
di-

JAKARTA

1. Sehubungan dengan beberapa permasalahan yang disebabkan oleh keberadaan layanan pemasaran transportasi menggunakan aplikasi internet khususnya UBER Asia Limited dan PT.SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA (GRAB CAR), bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :
 - a. dalam menjalankan usahanya baik dibidang transportasi maupun dibidang perangkat lunak maka setiap perusahaan harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia antara lain :
 - 1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 2) Undang - Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
 - 5) Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - b. beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh UBER Asia Limited dan PT.SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA (GRAB CAR) antara lain :
 - 1) pelanggaran terhadap pasal 138 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - 2) pelanggaran terhadap pasal 139 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Taksi Online Melanggar Undang-undang

Ratusan sopir taksi konvensional Senin (14/3) siang menggeruduk Balai Kota, Kominfo dan Istana Presiden. Dalam aksi tersebut mereka hendak memberi tahu kepada para pejabat, bahwasanya keberadaan taksi berbasis aplikasi online telah melanggar beberapa ketentuan undang-undang yang berlaku di negeri ini.

Salah satu massa aksi, Suryono mengatakan, bahwasanya taksi berbasis aplikasi online tidak tunduk dengan undang-undang, sehingga keberadaannya tidak legal.

“Mereka jelas ilegal. Kalau resmi mestinya mereka patuh sama undang-undang,” ucapnya kepada Aktual.com.

Suryono yang juga anggota Front Jak menambahkan, keberadaan taksi aplikasi online sama sekali tidak memberikan kontribusi bagi negara.

“Mereka nggak bayar KIR, nggak bayar pajak. Argo meter mereka nentuin sendiri,” imbuhnya.

Undang-undang yang dilanggar oleh keberadaan taksi online tersebut yakni; UU No 22/2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, UU No 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal,

Kepres No 90/2008 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, dan PP No 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. /Sukardjito

Kereta Api Cepat, Proyek Menteri BUMN Untuk 'Jebak' Presiden

Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung berpotensi menjadi masalah serius bagi pemerintah. Pasalnya, proyek tersebut dijalankan tanpa mengantongi seluruh perizinan yang diwajibkan dan tidak urgen bagi masyarakat.

“Yang tidak kalah fatalnya adalah dampak finansial dari proyek kereta cepat, kita harus berutang ke China sebesar Rp79 triliun yang harus dibayar hingga anak cucu kita selama 60 tahun,” ujar pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra saat dihubungi di Jakarta, Rabu (23/3).

Apabila nantinya proyek tersebut batal, kata Yusril, sama halnya



Menteri BUMN Rini Soemarno, menjebak Presiden Joko Widodo yang secara konstitusional sangat

berbahaya.

Seharusnya, menurut ketua umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) ini, menteri selaku pembantu presiden harus melaksanakan program dengan memperhatikan aspek ekonomi, hukum, dan asas kemanfaatan.

Seorang menteri juga tidak boleh mengabaikan suara publik dan memaksakan ambisi pribadinya dalam merancang sebuah proyek.

“Kalau ada menteri yang begini, yang kasihan presidennya menjadi sasaran tembak,” ucapnya.

Karenanya, Menteri BUMN disarankan mengevaluasi proyek itu. Bahkan, membatalkannya. “Jangan karena ulah seorang menteri, citra pemerintahan secara keseluruhan tercoreng,” tandas Yusril. /Zaenal Arifin



MENGINTIP LANGKAH AHOK

Saat bertemu dengan TemanAhok (kelompok relawan Basuki Tjahaja Purnama), di kediamannya Kompleks Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara, Minggu (6/3) malam, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan akan maju lagi di Pilkada DKI 2017 lewat jalur perseorangan.

“TemanAhok datang ke rumah. Mereka bilang, mereka tidak dapat menunggu lebih lama,” ujar Ahok, di Balaikota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, sehari berselang.

Di hadapan para relawan, Ahok juga menyebutkan nama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono, sebagai pendampingnya. “Saya menyuruh mereka mendaftar nama Heru sebagai calon wakil gubernur,” jelasnya.

Diduga, keputusan bekas politikus tiga partai itu akibat kegagalannya ‘mempengaruhi’ sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang tak bergeming atas ultimatumnya, agar ‘menyerahkan’ Wagub DKI yang juga Ketua DPP Bidang OKK PDIP, Djarot Saiful Hidayat, sebagai pendampingnya pada pilkada mendatang.

Sebab, berdasarkan informasi yang diperoleh Aktual, ketika DPD PDI-P seluruh Indonesia dikumpulkan di Kantor lama DPP PDI-P, kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (5/3), Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri, mempersilakan Ahok maju dari jalur perseorangan.

“Djarot kalau mau ikut (jalur perseorangan), silakan,” ujar salah satu ketua DPD PDI-P yang mengikuti kegiatan tersebut dan enggan disebutkan identitasnya, mengutip pernyataan ketumnya. Pernyataan sumber itu terkonfirmasi

dengan sikap Djarot, setelah Ahok mendeklarasikan diri maju dari jalur perseorangan bersama Heru. “Terserah itu, monggo,” ucapnya.

“Saya menjadi anggota partai bukan satu-dua tahun, saya bukan anggota biasa. Saya pengurus partai di tingkat pusat. Dan saya masih percaya betul, bahwa negara yang demokratis membutuhkan partai politik,” tegas eks walikota Blitar ini.

“Dia (Ahok) kalah setengah langkah dan sedang menggali kuburannya sendiri,” ucap Ubedilah Badrun, Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia, kepada Aktual, pada kesempatan terpisah.

Ubed, sapaannya, menilai demikian, lantaran Pilkada DKI, 15 Februari 2017, diprediksi bakal diikuti tiga pasang kandidat. Selain Ahok-Heru yang mengusung tagline Jakarta Baru 2, dimeriahkan jawara poros PDI-P dan Gerindra.

Sehingga, estimasi perolehan suara yang bakal diraup Ahok-Heru hanya dikisaran 1-1,1 juta suara dari sekira 7,6 juta daftar pemilih tetap (DPT). Kalkulasinya, 750 ribu suara dari pendukung yang menyerahkan KTP melalui TemanAhok. Sisanya, kader partai yang berhasil ‘ditarik’ eks calon gubernur Belitung Timur itu.

“Jadi, kalau saya membaca, yang dukung Ahok ini dulunya golput. Selebihnya pemilih loyalis, tunduk dengan keputusan partai politik,” jelasnya.

Karenanya, kata Ubed, Ahok sebelumnya berupaya mengeluarkan beberapa klaim, agar PDI-P mendukungnya. Misal, memiliki hubungan spesial dengan Megawati hingga meyakini Djarot bakal kembali ditunjuk untuk mendampinginya memimpin Jakarta.

Lalu, Ahok meniru suksesi Joko Widodo (Jokowi) jelang Pilkada DKI



Warga mengisi formulir dukungan bagi Basuki Tjahaja Purnama di sekretariat relawan Teman Ahok di kawasan Graha Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (21/3). Teman Ahok membuka posko tersebut untuk pengumpulan KTP sebagai bentuk dukungan warga DKI Jakarta kepada Ahok yang mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI 2017 melalui jalur independen.

2012 silam, dimana majunya eks walikota Solo itu berkat dorongan kuat dari para relawan. Tetapi, Ahok melupakan beberapa hal penting. Pertama, PDI-P memiliki aturan ketat terkait penjarangan legislatif maupun kepala daerah sejak beberapa tahun terakhir. Kedua, Jokowi merupakan kader Partai Banteng.

Sedangkan Ahok, justru tidak



pernah berkarir di PDI-P, kecuali Gerindra, Golkar, dan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB). “Oleh PDIP, itu dibaca sebagai track record inkonsistensi ideologi,” beber dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tersebut.

Potensi Ahok ‘tumbang’ pada kontestasi politik lokal juga dipengaruhi dari sikapnya terhadap partai politik, karena kerap berkonfrontasi dan resistensinya cukup besar. Pasalnya, berdasarkan kajian Puspol, 75 persen kemenangan pemilu dipengaruhi mesin partai. “Dan media tidak sampai 20 persen,” paparnya.

Kemudian, mengkritisi parpol

maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI, seperti adanya mahar dan ketakutan tidak memenangi pilkada. “Saya melihat memang Ahok ini gelisah,” ungkapnya.

Kasus dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras senilai Rp755 miliar juga banyak menguras ‘energi’ Ahok dalam menghadapi pilkada. Tapi, keberlanjutan kasus tersebut tak lepas dari proses penanganan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Persoalannya, siapa yang memegang kendali KPK?” tanya dia. Ahok coba menutupi kegelisahannya tersebut dengan menyerang

kredibilitas komisi antirasuhan serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga pertama yang menemukan adanya indikasi kerugian negara hingga Rp484 miliar dari kasus ini.

TemanAhok diprediksi juga tidak bisa menyumbang suara signifikan nantinya. Sebab, bersifat cair, organisasi tanpa bentuk (OTB), serta strukturnya tidak rapi hingga tingkat kecamatan. “TemanAhok pun tidak menyebar di seluruh kawasan Jakarta,” sambungnya.

Ubed meyakini Ahok telah membaca tantangan-tantangan itu. Sehingga, mantan bupati Belitung Timur selama 1,5 tahun tersebut berupaya melakukan *imaging policy*



Ubedillah Badrun



Suasana aktivitas di Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta.

melalui berbagai kebijakannya saat menjabat gubernur DKI.

“Memanfaatkan kebijakan-kebijakannya untuk mem-branding dirinya, pencitraan,” beber Uber. Imaging policy, menurut aktivis ‘98 ini, menjadi salah satu faktor NasDem mendukung Ahok, selain mulai retaknya relasi politik dengan PDI-P.

Selanjutnya, Ahok dan tim pun berupaya membangun citra melalui media sosial. Bahkan, telah dipersiapkan suami Veronica Tan itu. Namun, pembentukan opini melalui dunia maya diyakini tak berlaku, mengingat pemilih Jakarta tergolong rasional dan kritis. “Nanti akan ada perang antar-cyber army,” yakinnya.

Selaku petahana, Ahok juga berpotensi mengintervensi KPU DKI menyangkut anggaran dan kebijakannya. Tetapi, peluangnya cukup sulit dan berbahaya bagi Ahok.

Ahok pun memiliki dukungan finansial kapital yang cukup kuat, mengingat relasinya cukup dekat dengan beberapa pengusaha kakap. “Ahok juga mungkin didukung sembilan taipan itu,” katanya.

Para ‘sponsor’ tersebut berpotensi menggiring parpol untuk mendukung pencalonan Ahok. Apabila hal ini terjadi, ungkap Ubed, berbahaya bagi demokrasi ke depannya, mengingat ibukota merupakan barometer.

“Jakarta seharusnya jadi

contoh demokrasi yang berkualitas. Sehingga, partai-partai diharapkan tidak menerima mahar, menjual suara-suara itu. Kalau konsolidasi tanpa mahar, itu jauh lebih bagus,” tuturnya.

Disisi lain, meski mengalahkan Ahok tidak cukup berat pada pilkada mendatang, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan parpol nantinya. Misalnya, melakukan konsolidasi antarpol, sebagaimana yang telah disepakati PDI-P dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI, belum lama ini, dimana berupaya merangkul dan melakukan pertemuan rutin dengan partai lain yang belum menentukan sikap.

“Kalau berhasil konsolidasi dan menemukan satu argumentasi untuk sepakat bersama mengusung satu calon, itu kiamat untuk Ahok,” yakin Ubed.

“Sampai sekarang, masih kontestasi subjektif, belum rasional, kontestasi gagasan. Saya berharap, mereka (calon parpol) basisnya adalah gagasan,” sambung pendiri Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ).

Adapun calon yang layak diusung, katanya, yang memiliki tipologi seperti eks Gubernur DKI, Ali Sadikin, yakni memiliki rekam jejak mumpuni, berlatarbelakang militer, visioner, memiliki karakter kuat.

“Siapa dia? itu PR parpol,” jawabnya.

Sementara itu, Direktur Jakarta Monitoring Network (JMN), Masnur Marzuki, meminta akuntabilitas dana kampanye seluruh calon, termasuk TemanAhok, yang telah membantu suksesi Ahok pada pilkada mendatang.

“Dari mana dananya? Karena booth-booth di mal itu kan enggak gratis. Belum lagi alat-alat yang dipakai,” ujarnya.

Masnur turut menyangsikan bahwasanya TemanAhok berhasil menggalang dana hingga Rp2 miliar dari penjualan merchandise sejak sembilan bulan lalu. “Jangan kemudian akal-akalin dari jual merchandise. Enggak masuk akal itu,” ketusnya.

Dia berharap, DPR yang kini tengah menggodok revisi Undang-undang No. 8/2015 tentang Pilkada memasukkan aturan tentang transparansi dana kampanye, baik menyangkut penerima dan alokasi anggarannya. Menyangkut hasil tes kesehatan bakal pasangan calon pun demikian.

“Mudah-mudahan regulasi segera muncul dan ada PKPU (Peraturan KPU) yang jelas. Minimal SKB (surat keputusan bersama) antara KPU, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan Mendagri (Menteri Dalam Negeri),” harapnya. ● Fatah Hidayat Sidik-M Vidia Wirawan

Tantangan KPU DKI Cukup Besar

Pilkada DKI baru digelar satu tahun lagi, namun dinamikanya mulai bergelora. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI memaklumi hal ini, mengingat Jakarta merupakan ibukota negara dan menjadi barometer bagi daerah lain.

Meski demikian, kata Komisioner KPU DKI, Betty Epsilon Idroos, pihaknya hingga kini masih sibuk konsolidasi dengan berbagai pihak menyangkut persiapan pilkada. Misalnya, bersama Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, membahas tentang data pemilih.

“Karena akan jadi sorotan, karena ini menjadi wilayah yang perputarannya sangat cepat dan daerah-daerah grey area-nya cukup banyak,” ujarnya saat berbincang dengan Aktual di kantornya, beberapa waktu lalu.

Betty memberitahkan, bukan perkara mudah untuk menyusun daftar pemilih tetap. Pasalnya, basis data berasal dari Disdukcapil, sebelum akhirnya diserahkan ke KPU DKI, melalui Kemendagri dan KPU RI.

Sejumlah titik juga cukup krusial saat pendataan, khususnya seperti di rumah sakit, apartemen, tanah sengketa, lembaga pemasyarakatan, tempat pengusuran dan pengungsian, serta wilayah grey area lainnya.

“Kalau pileg kemarin, yang penting WNI, jadi bisa milih, meski dengan beberapa kategori. Kalau sekarang, kan enggak. Jadi, kesiapan logistik itu berkaitan dengan yang ada di situ,” jelasnya. Dia pun berharap, basis data yang diserahkan ke KPU DKI tingkat presisinya tinggi, sehingga

tidak kesulitan saat melakukan pemutakhiran.

KPU DKI sendiri mengasumsikan jumlah DPT pada pilkada mendatang mencapai 7,6 pemilih atau naik sekitar 500 ribu pemilih dibanding pemilu 2014. Untuk tepat pemungutan suara (TPS), diperkirakan bakal mencapai 12.964 titik dan maksimal 800 pemilih per TPS.

“Kita juga lihat dengan geografisnya. Kalau jauh, bisa antara 400-600 pemilih,” bebernya.

Peraturan yang mengharuskan kandidat memperoleh 50 persen plus 1 (satu) suara pada pilkada, juga menjadi masalah lain yang disoroti KPU. Regulasi yang tercantum dalam UU No. 29/2007 tersebut, mengisyaratkan pesta demokrasi bakal berlangsung dua putaran.

Tingginya target partisipasi pemilih mencapai 77,5 persen, turut menjadi tantangan lain bagi KPU. Terlebih tingkat keikutsertaan masyarakat pada pilkada 2012 cuma mencapai 66,7 persen. “Karena Jakarta merupakan barometer, kami harapkan capaian itu tercapai atau lebih, karena menunjukkan legitimasi,” inginnya.

Mengantisipasi ada masalah serius ketika tahapan pilkada dimulai, semenjak dini KPU DKI telah melakukan berbagai upaya, selain berkoordinasi dengan berbagai pihak. Seperti, mengaktifkan layanan informasi publik berbasis online (e-PPID) dan hal-hal teknis lain yang harus disosialisasikan.

“Kemungkinan kami akan menggunakan media sosial dan aplikasi, agar sosialisasi lebih massif,” jelas mantan ketua umum Korps HMI-wati (Kohati) PB HMI ini.

Menyangkut anggaran, kata Betty, KPU DKI tidak menghadapi masalah serius. Semuanya telah diatur secara seksama sesuai beban pihaknya sebagaimana diamanatkan undang-undang dan asumsi-asumsi yang mungkin terjadi. Dia juga meyakini, pemerintah provinsi (pemprov) takkan menyanderanya, kendati nota penandatanganan naskah hibah perjanjian daerah (NPHD) belum terjadi dan belum cair.

“Lalu bagaimana pemprov intervensi kami? Enggak bisa. Anggaran kan pakai NPHD dan itu anggaran publik. Jadi, optimis dapat profesional,” tegasnya. Anggaran yang diajukan KPU mencapai Rp498 miliar.

Tentang verifikasi calon dari jalur perseorangan, KPU DKI bakal memverifikasi seluruh dukungan kepada calon. Tahap administrasi, bakal disesuaikan jumlahnya dengan kesesuaian KTP dan nama di formulir dengan surat dukungan.

“Setelah itu, lalu akan kita mutuskan untuk ditanya ke lapangan. Kalau ada KTP di luar DKI, tentu TMS (tidak memenuhi syarat),” ucap alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini. Data yang tidak sesuai juga tergolong TMS.

Betty mengingatkan, KPU bakal memverifikasi seluruh dukungan, bukan sekadar memenuhi syarat minimum. Dan ketika ke lapangan, tim pasangan calon diperkenankan ikut mendampingi verifikator.

“Itu kan pemantau sifatnya. Mau mantau atau enggak, daftar dulu dong. Kan kami juga menjaga situasi dan kondisi. Kalau mau memantau, harus mendaftar dulu,” ucapnya ketika ditanya bila ada pihak lain, termasuk parpol, yang ingin mengikuti proses verifikasi faktual dukungan calon persorangan. © Fatah Hidayat Sidik-M Vidia Wirawan



Betty Epsilon Idroos



MENGUPAS GAYA PENCITRAAN AHOK

Ajang Pilkada DKI Jakarta menjadi “medan tempur” yang menantang bagi perang pencitraan, antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan para kandidat lainnya. Ahok mencoba menampilkan gaya kepemimpinan mirip Bang Ali, tetapi belum “menjiwai.”

Pencitraan adalah bagian dari politik. Tidak ada politisi yang bisa lepas dari pencitraan. Setiap jabatan publik, yang membutuhkan dukungan publik, dalam tahapan tertentu memerlukan pencitraan. Dalam bahasa positif pemasaran, politisi —sebagai sebuah produk yang mau dijual— membutuhkan branding.

Anda pasti pernah menonton di televisi, di mana politisi yang sedang menemui masyarakat



(negatif), “pencitraan” sebenarnya adalah istilah netral. Kita semua sedikit banyak melakukan pencitraan. Kalau Anda diundang ke acara resepsi perkawinan, Anda pasti tidak akan datang mengenakan kaos oblong, tapi minimal memakai baju batik, atau syukur-syukur pakai jas. Hal ini karena Anda ingin dipandang secara positif oleh tuan rumah dan masyarakat lain.

Nah, dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) Daerah Khusus Ibukota Jakarta, cukup menarik mengupas gaya pencitraan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang ingin mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan berikutnya. Ahok, seperti Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Joko Widodo (Jokowi), sangat sadar akan arti penting pencitraan.

Audiens yang Non-Ideologis

Dalam strategi pencitraan, sangat penting memahami *audiens* atau khalayak yang menjadi sasaran pencitraan. *Audiens* itu adalah warga Jakarta, yang bersifat urban,

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berfoto bersama warga di sela-sela peresmian kegiatan “Gerakan Satu Hati Bangun Komunitas Harapan Indonesia”, Jakarta, Sabtu (5/3).

multietnis, multiras, multikultural, kosmopolitan, pragmatis, cair, kurang ideologis, memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, dan akses informasi yang baik.

Pada pemilu legislatif 2014, PDI Perjuangan menang di DKI Jakarta dengan suara 18,95 persen, disusul Partai Golkar (14,75 persen), Gerindra (11,81 persen), dan Partai Demokrat (10,19 persen). Pada 2009, suara sah di pileg DKI Jakarta sebanyak 3.599.906 dan Partai Demokrat unggul dengan 33,58 persen, disusul Partai Keadilan Sejahtera atau PKS (17,23 persen), PDI Perjuangan (10,74 persen), Partai Golkar (6,47 persen), dan Gerindra (5,16 persen).

Sedangkan pada pileg 2004, PKS tampil sebagai pemenang, disusul Partai Demokrat. Kemenangan PKS di Jakarta pada 2004 ini menarik untuk dikaji, mengingat PKS adalah kelanjutan dari Partai Keadilan, yang dalam pemilu 1999 belum mendapatkan suara signifikan.

Hal-hal ini menunjukkan, masyarakat Jakarta memang dinamis, sekaligus cair dan kurang ideologis. Meskipun pernah menjadi pemenang dalam pileg 2004, ternyata kandidat gubernur yang didukung PKS gagal jadi pemenang. Ketika Jokowi maju

bawah dan sedang diliput media, pasti bertanya-jawab dan beramah tamah dengan warga setempat. Jika ada anak kecil dari warga setempat, biasanya anak kecil ini digendong dan ditimang-timang atau diajak ngobrol oleh si politisi, untuk menunjukkan “kedekatan dengan rakyat.” Sedangkan apakah kemudian si politisi itu akan betul-betul mengambil kebijakan yang pro-rakyat, itu adalah soal lain lagi.

Meskipun pencitraan sekarang sering dimaknai secara peyoratif





Gubernur Ali Sadikin mengenakan kostum adat Betawi.

dalam pilkada DKI Jakarta, PKS dan berbagai partai besar yang mendukung pesaingnya, Fauzi Bowo, gagal mencegah kemenangan Jokowi.

Ibukota Jakarta sering digambarkan sebagai kota yang “keras,” sehingga pendekatan kepemimpinan yang dipandang tepat di Jakarta adalah tegas, keras, tanpa basi-basi, *to the point*, dan “*no nonsense approach*.” Salah satu model kepemimpinan yang dianggap sukses dalam memimpin DKI Jakarta, adalah gaya kepemimpinan Ali Sadikin (Bang Ali) yang lugas, tegas, tapi juga manusiawi. “Manusiawi” dalam arti mampu mengangkat sisi batin warga Betawi, yang semakin terpinggirkan oleh derap pembangunan fisik yang pesat di wilayah DKI Jakarta.

Pemanfaatan Pajak Judi

Dalam beberapa aspek, Ali Sadikin yang pragmatis juga berani bersikap kontroversial dalam isu yang sensitif. Gagasan Ali Sadikin yang

sempat ditentang kaum ulama adalah pemanfaatan pajak dari judi, yang dilegalisasi di daerah tertentu, untuk membangun sarana fisik dan jalan raya di Jakarta.

Ali Sadikin berpikir praktis. Daripada judi dilarang, yang berakibat orang akan bermain judi luar negeri yang membuat devisa lari ke luar negeri, lebih baik judi dilegalisasi secara terbatas, agar uang itu masuk ke kas Pemda DKI dan bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas umum. Kepada mereka yang terus memprotes gagasan itu, Ali Sadikin mengatakan, “Suruh mereka jangan menggunakan jalan raya di DKI Jakarta, karena jalan itu dibangun dengan uang judi!”

Ali Sadikin juga pernah dikritik sebagai “tidak manusiawi,” ketika giat melakukan pengusuran paksa untuk menertibkan dan melebarkan jalan raya di DKI Jakarta. Namun, langkah-langkah Ali Sadikin yang keras dan tegas itu terbukti kemudian malah dipuji sebagai tindakan yang

tepat. Terbayang, entah bagaimana semrawutnya kota metropolitan ini, jika Ali Sadikin waktu itu takut melakukan pengusuran karena khawatir tidak populer.

Ahok tampaknya menerapkan gaya kepemimpinan yang mirip Bang Ali. Namun, Ahok memiliki “trade mark” tersendiri yang membedakannya dengan Bang Ali. Dalam pengekspresianannya dan cara bertuturnya, Ahok lebih kasar. Keras dan tegas sebetulnya tidak harus identik dengan kasar. Seorang pemimpin bisa kuat, keras, dan tegas, meski dalam cara bertutur tetap lembut. Presiden Soeharto adalah tipe pemimpin yang kuat, tetapi publik tidak pernah melihat Pak Harto memaki-maki bawahan atau marah-marah dengan kasar. Tetapi, efek tindakan Pak Harto terasa dan sangat berpengaruh.

“Jiwa” Warga Betawi

Hal lain adalah soal “jiwa.” Menurut sejarawan Betawi, JJ Rizal, Bang Ali menyadari bahwa



Sejarahwan Betawi JJ Rizal, Redaktur Senior Aktual.com Satrio Arismunandar, Seniman Betawi H. Mandra Naih, Calon Gubernur DKI Jakarta Hasnaeni 'Wanita Emas' Moein, hadir dalam diskusi bertemakan Tantangan Budaya Betawi dalam Arus Liberalisasi Global di Jakarta, Minggu (6/3).

membangun Jakarta bukan cuma membangun fasilitas fisiknya. Esensi pembangunan Jakarta bukan sekadar munculnya gedung-gedung pencakar langit yang megah, atau berbagai jalan tol yang mulus. Namun, bagaimana membangun “jiwa” penghuninya, khususnya “jiwa” warga Betawi.

Penyematan sebutan “Bang” pada Ali Sadikin adalah pertama kalinya diberikan dari bawah oleh warga Betawi, yang awalnya merasa terpinggirkan oleh pembangunan fisik di ibukota. Awalnya mereka tinggal di tengah kota, tetapi makin lama makin terpinggirkan. Ali Sadikin adalah gubernur yang mengangkat harkat mereka sebagai warga Betawi.

Dalam proses mengangkat martabat warga itu, Ali Sadikin

bahkan pernah meminta diadakan seminar oleh Universitas Indonesia, untuk merumuskan apa arti “Betawi” dan siapa sebenarnya yang disebut sebagai “orang Betawi” itu. Hal ini dilakukan agar Jakarta itu punya ciri kultural, punya “jiwa,” yang dirasakan dan dihayati oleh warga penghuninya. Hal-hal semacam ini oleh JJ Rizal dan seniman Betawi, Mandra --dalam diskusi yang diadakan Aktual Forum-- tidak terlihat di DKI Jakarta di bawah pemerintahan Ahok.

Pencitraan lain adalah soal isu keislaman. Ahok mencitrakan diri sebagai “saya non-Muslim, tetapi saya lebih bersih dari para tokoh atau bakal calon gubernur lain yang Muslim.” Di media sosial juga beredar ungkapan populer yang menyatakan: “Lebih baik memilih pemimpin kafir yang bersih, ketimbang pemimpin Muslim yang korup.” Wacana ini muncul sebagai *counter* dari wacana “haram hukumnya bagi warga Muslim untuk memilih pemimpin yang kafir.”

Ahok mencoba mengatas

“titik lemah” ini dengan sejumlah langkah simbolis. Misalnya, dengan membangun masjid di lingkungan kantor Pemda DKI Jakarta (yang diklaim, tidak pernah dilakukan di era Fauzi Bowo). Juga, memberangkatkan umroh sejumlah pegawai DKI Jakarta, dan menaikkan gaji warga Muslim yang jadi penjaga kuburan. Dalam *audiensi* di kalangan tokoh Muslim, Ahok secara terbuka mengatakan, ia pada dasarnya sudah sangat menghayati ajaran Islam, dan yang kurang dari dirinya hanyalah “hidayah” (untuk masuk Islam).

Bahkan Ahok tak segan-segan “mengeritik” ritual Kristen, agamanya sendiri. “Enak ya, tinggal nyanyi-nyanyi di gereja, terus bisa masuk surga!” katanya. Ajaran Islam – dalam perspektif Ahok-- lebih logis, karena harus banyak beramal agar bisa masuk surga. Namun, dengan mengatakan ini bukan lantas Ahok sudah mendapat “hidayah.” Ahok pada dasarnya adalah tetap seorang *player*, seorang politisi! • Satrio Arismunandar



Ali Sadikin (1975)

MEMOTRET BEBERAPA EPISODE SEMASA ALI MEMIMPIN JAKARTA

April 1966, ternyata Presiden RI pertama Sukarno, meskipun kekuasaan politiknya mulai dilumpuhkan setelah demi setahap menyusul meletusnya Gerakan 30 September 1965, tapi rupanya masih bisa membuat sebuah keputusan bersejarah, meskipun berlingkup lokal. Yaitu menunjuk Letnan Jenderal KKO (sekarang marinir) Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta. Itu waktu, jangankan khalayak ramai di ibu kota, Ali Sadikin yang kelak terkenal dengan sapaan Bang Ali, terkejut dibuatnya.

Namun pada 28 April 1966, ketika Bang Ali resmi dilantik sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta itu, tekat-teki tersebut terjawab juga melalui pidato Bung Karno yang disampaikan tanpa teks. “Ada, ada yang ditakuti dari Ali Sadikin itu. Apa? Ali Sadikin itu orang yang keras. Orang keras. Dalam bahasa Belandanya malah ada yang berkata, *dia een koppige vent, koppig*. Saya kira dalam hal mengurus kota Jakarta Raya ini baik juga *een beetje koppigheid* (sedikit keras kepala). Apalagi *ndoro* dan *ndoro den ayu* sudah tahu, tidak boleh membuang sampah semau-maunya di muka rumah di pinggir jalan, tapi *ndoro den ayu ndoro den ayu* toh menaruh sampahnya di pinggir jalan. Nah, itu perlu dihadapi oleh orang yang sedikit keras, yang sedikit *koppig*.”

Meskipun sejarah membuktikan betapa tepat Bung Karno dalam mengkarakterisasikan watak Bang Ali, namun sepertinya bukan itu misi sesungguhnya yang dibebankan kepada putra kelahiran Sumedang itu. “Saya harap, engkau akan bisa menanggulangi segala

problem(masalah) daripada kota besar Jakarta Raya ini. Buatlah Jakarta ini kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Malahan jadi kekaguman seluruh umat manusia di dunia ini.”

Namun di atas semua itu, ada ungkapan Bung Karno yang menarik dan layak jadi renungan saat ini ketika sedang marak-maraknya pencalonan gubernur DKI Jakarta: “Cita-citaku mengenai kota Jakarta ini akan saya *supplant* kepadamu, seperti saya iris, saya masukkan ke dalam kalbumu, Ali Sadikin. Itu bukan pekerjaan yang gampang memenuhi cita-cita, cita-cita yang besar. Tetapi Insya Allah, *doe je best*(berusahalah dengan sebaik-baiknya), agar supaya engkau dalam memegang ke gubernuran Jakarta Raya ini benar-benar juga sekian tahun lagi masih orang mengingat, *dit heft* Ali Sadikin *gedaan*, inilah perbuatan Ali Sadikin. Inilah yang dilakukan Ali Sadikin.”

Sebagai sebuah dokumen sejarah yang dibaca saat ini, apa yang disampaikan Bung Karno seakan sebuah wasiat politik. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, setahun kemudian, praktis kekuasaan pemerintahan Sukarno beralih ke tangan Jenderal Suharto sebagai Penjabat Presiden. Namun saat yang sama, ungkapan dan harapan Bung Karno pada Ali Sadikin itu, mengandung harapan sekaligus restu dan doa.

Begitu memulai hari-hari pertama tugasnya, Bang Ali langsung bisa menyimpulkan ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh Pemda DKI Jakarta. Pertama, kondisi pemerintahan daerah baik dari segi susunan organisasi, mutu dan jumlah pegawai serta tata kerjanya,

tidak memungkinkan orang untuk menangani masalah-masalah besar yang dihadapi Ibukota pada saat itu. Kedua, rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pemeliharaan kondisi kota boleh dikatakan kurang, malahan sangat kurang.

Setelah memetakan inti masalah yang dihadapi Jakarta, Bang Ali menggariskan strategi penanganan yang meliputi lima pokok kebijaksanaan. Pertama, memperbaiki iklim hubungan kerja antara perangkat eksekutif dengan DPRD. Kedua, melakukan perombakan susunan organisasi pemerintahan daerah ke arah peningkatan daya guna dan hasil guna misi pelayanan. Ketiga, peningkatan sistem dan prosedur kerja, termasuk tertib administrasi, pembagian dan perincian kerja serta penyusunan prosedur tetap untuk berbagai misi pelayanan. Keempat, penyusunan kerangka kerja yang berencana dengan menetapkan rencana induk sebagai pedoman dasar bagi berbagai kegiatan pemerintahan daerah. Dan kelima, menggerakkan partisipasi masyarakat.

Tentu saja penyusunan strategi dan kerangka kerja bukan pekerjaan paling pelik pada fase awal kepemimpinannya mengelola pemerintahan DKI Jakarta. Yang paling krusial kala itu adalah fakta bahwa dana yang tersedia di kas Pemda DKI ternyata hanya Rp 66 juta. Berasal dari hasil pungutan daerah dan subsidi, dari pusat. Sepertiganya hasil Daerah dan dua pertiganya subsidi dari Pusat.

Mendengar gambaran itu, Bang Ali sangat terkejut, pastinya jumlah segitu amat kecil baik untuk anggaran rutin, apalagi untuk mewujudkan cita-cita dan rencana besar Bang Ali untuk membangun Jakarta sebagai kota yang megah namun berkarakter.

Sekadar informasi, waktu itu penduduk Jakarta masih tiga juta enam puluh ribu orang. Dan akan semakin meningkat disebabkan gelombang urbanisasi yang tidak putus-putusnya. Dengan luas wilayah



577 km2. Terbagi dalam tiga wilayah Jakarta waktu itu: Jakarta Utara, Jakarta Tengah dan Jakarta Selatan. Tiap wilayah dikepalai oleh seorang Bupati.

Adapun konstalasi politik di internal DKI Jakarta kala itu juga tidak kalah runyamnya. Apalagi saat itu belum berselang setahun setelah meletusnya Gerakan 30 September 1965, yang kemudian memicu pergolakan di dalam tubuh angkatan darat, dan bahkan pada perkembangannya kemudian, juga mengimbas ke pemerintahan Presiden Sukarno.

DPRD DKI Jakarta, sebagai lembaga legislatif mitra Pemda DKI, juga baru saja menata diri terkena terpaan pertarungan kekuasaan pasca G-30 S 1965. Ketika Bang Ali mulai menjabat gubernur, DPRD Gotong Royong dipegang oleh pimpinan sementara yang terdiri dari: Ayatullah Saleh dari golongan Islam, Erwin Baharuddin dari golongan Nasionalis, dan M Moeffreni Moe'min dari golongan Angkatan Bersenjata.

Kembali ke ketesediaan dana minim yang hanya Rp 66 juta, program jangka pendek bang Ali adalah mencari sumber perolehan dana secara mandiri melalui retribusi dan pajak. Namun tidak hanya itu saja. Ketika pemerintah Daerah diwajibkan cari uang, sifat atau sikap jiwa *entrepreneurship* harus ada pada Pemerintah Daerah. Artinya, sifat dan sikap jiwa itu juga harus ada pada gubernur. Maka muncullah istilah baru dari Ali Sadikin: *Service is money, money is tax*. Pelayanan adalah uang, dan uang adalah pajak. Sehingga tanpa pajak, tak ada pelayanan. Inilah landasan Bang Ali untuk menggalakkan pungutan pajak kepada masyarakat Jakarta.

Selain itu, filosofi Bang Ali dalam mengelola Jakarta ini yang menarik. Lepas kita setuju atau tidak setuju. “Bahwa pemerintah Daerah itu ibarat satu perusahaan besar. Siapa yang pemegang sahamnya? Rakyat! Siapa direksinya? Gubernur! Siapa pengawas dan komisarisnya? DPRD. Dengan demikian, maka antara

eksekutif dan DPRD, berarti eksekutif sebagai direksi dan DPRD sebagai komisaris, mempunyai tujuan yang sama. Sehingga dengan demikian kami menghindari konflik-konflik kepentingan tertentu. Kami punya kewajiban yang sama memajukan Pemda dan masyarakatnya.”

Berpikir *out of the box* Menggali Sumber Keuangan Bagi Kepentingan Masyarakat

Kita bisa saja terlibat dalam kontroversi apakah tepat menghalakan judi melalui pungutan pajak, namun cara pandang Bang Ali untuk sampai pada keputusan tersebut kiranya cukup inspiratif.

Sedari awal Bang Ali tahu persis bahwa meski resminya dilarang, Judi pada prakteknya ada di Jakarta. Malahan bang Ali juga tahu bahwa di belakangnya ada oknum-oknum ABRI tertentu yang melindunginya. Bahkan yang hidup dan mengambil untung darinya, tapi tanpa bayar pajak pula. Kenyataan ini malah menjadi tantangan tersendiri bagi bang Ali.

Setelah menyerap dari berbagai sumber dan masukan dari beberapa staf dekatnya, Bang Ali ternyata ada aturan hukum yang menetapkan bahwa Kepala Daerah punya wewenang untuk memungut pajak atas izin perjudian. Yaitu Undang-Undang No 11 tahun 1957. UU ini sejatinya berlaku untuk semua gubernur tapi tidak yang berani melakukannya. Membaca ini, bagi bang Ali seakan sebuah temuan baru. “Saya berani, untuk keperluan rakyat Jakarta saya berani.”

Gagasan utama yang ada di benak bang Ali sederhana saja. “Jadi lebih baik disahkan saja daripada dibiarkan liar dan tidak menghasilkan apa-apa untuk pemerintah, dan untuk rakyat,” begitu kata Bang Ali seperti penuturannya kepada Ramadhan KH untuk memoarnya: Bang Ali, Demi Jakarta 1966-1977.

Tentu saja seperti diakui sendiri oleh bang Ali, banyak kalangan agamawan yang menentang. Apalagi bang Ali sendiri mengatakan judi



Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama turun dari mobil saat tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/2).

itu memang haram. Namun apapun kata orang, ya inilah salah satu watak kepemimpinan Bang Ali yang kelak dikenang masyarakat. Berani untuk tidak populer.

“Judi ini saya atur hanya untuk kalangan tertentu. Orang-orang dalam *way of life*-nya tak bisa hidup tanpa judi. Dan untuk itu mereka pergi ke Macao. Nah, saya pikir, untuk apa mereka menghambur-hamburkan uang di Macao. Lebih baik untuk pembangunan di Jakarta saja.”

Agaknya bagi Bang Ali, pungutan pajak judi ini dananya bisa didayagunakan untuk membangun jalan, sekolah, puskesmas, pasar dan lain-lain. “Kepada mereka yang tetap menentang judi, saya bilang, Bapak-Bapak, kalau masih mau tinggal di Jakarta, sebaiknya beli helikopter. Karena jalan-jalan di DKI dibangun dengan pajak judi. Nah, cara



semacam itu yang membuat orang kemudian tertawa.”

Tapi sulit dibayangkan jika Gubernur Ahok sekarang membuat keputusan-keputusan strategis tanpa minta pertimbangan DPRD. Di era Bang Ali, untuk keputusan memberi izin perjudian, tidak meminta persetujuan DPRD.

Maka, dimuailah kebijakan mensahkan perjudian. Mulai dengan lotere Totalisator, lotto, mencontoh dari luar negeri, lalu macam-macam judi lainnya, sampai kepada hwa-hwe. Tapi seperti sudah digariskan sejak awal, Bang Ali hanya mengizinkan orang Cina untuk jadi bandar judi. “Orang kita tidak boleh judi. Apalagi orang Islam. Haram bagi orang Islam main judi. Jadi judi yang diselenggarakan pemerintah DKI hanya bagi golongan tertentu saja.”

Lepas dengan segala

kontroversinya, ini memang cara berpikir *out of the box* ala Bang Ali dalam menggali sumber keuangan bagi Pemda untuk kesejahteraan masyarakatnya. Hasil judi tersebut oleh Bang Ali kemudian dimasukkan ke dalam APBD, dalam kelompok penerimaan khusus. Dan para anggota DPRD bisa mengontrol ke mana hasil judi itu larinya.

Hasil judi itu digunakan untuk pembiayaan pembangunan bidang sosial, pendidikan, sarana, termasuk mental dan kerohanian. Begitu juga untuk pembangunan gedung-gedung sekolah dasar yang waktu itu dirasakan masih sangat minim. Perbaikan dan pemeliharaan jalan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas perkotaan, fasilitas kebudayaan dan lain sebagainya.

Hubungan Kemitraan antara Bang Ali dan DPRD

Untuk ukuran tempo dulu, ketika sistem politik masih otoriter dan segalanya ditentukan oleh pemerintah atau pihak eksekutif, Bang Ali justru mampu menghidupkan hubungan kemitraan yang khas di tengah kuatnya dominasi eksekutif terhadap legislatif baik di pusat maupun daerah.

Nampaknya usaha Bang Ali untuk mengharmoniskan hubungannya dengan DPRD-GR amat terbantu oleh UU No 18/1965 dan penegasan Menteri Dalam Negeri dalam surat kawatnya pada 12 Mei 1966, agar jabatan Ketua Dewan tetap dijabat oleh Gubernur Kepala Daerah sampai disempurnakannya UU no 18/1965.

Merujuk sistem politik waktu itu, kedudukan antara legislatif dan eksekutif di daerah beda dengan di pusat. Pada tingkat nasional, eksekutif dan legislatif terpisah. Di tingkat daerah pengertian pemerintah daerah itu adalah gubernur dengan DPRD-nya. Jadi merupakan satu paket. Sedangkan di pusat, DPR di satu pihak, sedang presiden sebagai Kepala Pemerintahan di pihak lainnya.

Tata kelola pemerintahan di era Ali Sadikin ini sepertinya cukup inspiratif untuk membandingkan pola pemerintahan daerah sekarang yang semakin beraroma liberal.

Seperti pandangan Bang Ali melukiskan situasi kala itu, dalam konstalasi pemerintahan daerah, DPRD merupakan suatu badan resmi yang mewakili rakyat. Lembaga ini adalah pembawa aspirasi rakyat, tetapi di lain pihak juga sebagai mitra pemerintah/eksekutif dalam merumuskan kebijaksanaan. Menurut Bang Ali, kerjasama erat yang berhasil terjalin di eranya didasari asas tanggungjawab bersama, serta pemberian hak dan kewenangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Salah satu seni berpemerintahan yang Bang Ali bangun didasari prinsip: Tidak semua kegiatan dituangkan dalam bentuk aturan-aturan, tetapi dikembangkan melalui lembaga konsensus serta pengertian



Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta, Minggu (28/2).

bersama antara eksekutif dan legislatif. Seraya tetap mengupayakan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kata kunci dari keberhasilan merajut kemitraan antar Gubernur dan DPRD: Saling mengingatkan terhadap fungsi dan tugasnya masing-masing. Sehingga antara gubernur Kepala Daerah yang notabene merupakan eksekutif dan DPRD yang legislatif, bukan saja

tercipta keserasian, bahkan juga persenyawaan antar kedua lembaga tersebut. Semua garis kebijaksanaan diputuskan oleh DPRD bersama-sama dengan Gubernur Kepala Daerah.

Cerita Seputar Pengembangan Wilayah dan Pengendalian Tanah

Sebelum Bang Ali jadi gubernur, setiap kali lewat di tanah-tanah kosong, di sana dipasang orang

papan-papan dengan bacaan “Tanah ini milik kesatuan ini. Tanah ini kepunyaan kesatuan anu. Yang menurut penilaian bang Ali, merupakan gejala yang semakin marak ketika ABRI disalahgunakan orang yang berani-beranian.

Ketika sudah jadi gubernur, dia periksa keadaan yang sebenarnya, ternyata kebanyakan cuma akal bulus saja. Tak ada bukti kalau tanah itu milik kesatuan A atau B. Begitupun,



dari situlah BAli mula tersadar bahwa masalah tanah ini akan jadi masalah pelik dalam begitu masuk ke soal pembangunan kota Jakarta. Terutama pengendalian tanah.

Suatu ketika, bang Ali pernah menyetop kegiatan “Yayasan Pelaksana Pembangunan Wilayah Kebayoran” yang telah melancarkan penebangan pohon-pohon karet di daerah Kebayoran Lama, Daerah Tanah Kusir, yang akan menjadikan

tanah itu berpetak-petak untuk obyek jual beli.

Tindakan yayasan itu telah menimbulkan spekulasi harga tanah yang meroket, yang mengganggu ketertiban umum. Untunglah seorang Bang Ali, bisa membaca tindakan yayasan ini sebagai pelanggaran peraturan agraria dan ketentuan-ketentuan pembangunan di lingkungan Jakarta.

Kalau diperbandingkan dengan Ahok yang begitu gampangya mengizinkan Reklamasi Teluk Jakarta, maka bang Ali justru megecam praktek beberapa yayasan perguruan yang menguasai secara penuh tanah-tanah di wilayah Jakarta, tapi tidak mempergunakannya untuk kepentingan pendidikan.

Selain itu, meski belum ada pengaturan pengendalian tanah perkotaan, bang Ali memberanikan diri untuk mengambil langkah-langkah strategis seperti membatasi pengeluaran hak-hak milik baru, penetapan harga-harga tanah untuk kepentingan umum, dan penetapan batasan luas tanah tertentu dengan persyaratan tertentu pula.

Kebijakan Penggunaan Tanah Dengan Melibatkan Modal Swasta

Bermula ketika Rio Tambunan pada suatu hari datang kepada Ali Sadikin, dengan gagasannya tentang *Real Estate*. Waktu itu, konsep pengembangan perumahan macam ini masih merupakan gagasan baru dan belum semua orang paham. Termasuk bang Ali.

Singkat cerita, setelah paham maksudnya, Bang Ali mengajak Ciputra dalam kerangka kerjasama pengembangan penggunaan tanah untuk pengembangan kota lewat konsep *Real Estate*. Kebijaksanaan ini ditetapkan Ali Sadikin sejak 1975.

Gagasan real estate ini didasarkan pada kekusaran Bang Ali bahwa kegiatan penggunaan tanah secara perorangan pelaksanaannya seringkali terpecah-pecah lokasinya, lagipula pola pembangunan perumahan lebih mengutamakan pembangunan rumah

untuk penggunaan sendiri semata-mata. Pola pertumbuhan pun kurang menguntungkan dilihat dari segi perkembangan kota.

Bukan itu saja. Pembangunan secara perseorangan umumnya tidak memikirkan usaha untuk menyediakan prasarana yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan kawasan pemukiman baru serta tidak ada usaha untuk menyediakan sarana sosial yang dibutuhkan dalam lingkungan perumahan yang baru, seperti sekolah, puskesmas, tempat-tempat rekreasi, dan sebagainya. Sehingga akhirnya jadi beban bagi Pemerintah Daerah.

Maka itu, Bang Ali amat mendukung gagasan real estate yang ditawarkan Rio Tambunan. Dalam pendekatan pengembangan wilayah oleh real estate kegiatan pembangunan didasarkan atas pengembangan satu unit lingkungan yang lengkap, yang tidak saja terdiri dari perumahan-perumahan, melainkan juga sarana-sarana lainnya yang seharusnya dimiliki di dalam unit lingkungan itu. Sehingga keuntungan Pemerintah Daerah di samping pembiayaan penyediaan tanah, pembangunan prasarana dan sarana sosial dapat disediakan oleh real estate. Selain itu dimungkinkan wilayah baru dibangun secara teratur sesuai perencanaan dan sekaligus tersedianya prasarana dan sarana secara lengkap.

Prinsip manajemennya tidak didasarkan pada usaha mencari untung belaka, melainkan upaya untuk menguasai dan mengarahkan secara langsung pengembangan kota. Kepada otorita diberikan wewenang untuk pengembangan atas suatu areal tanah yang ditunjuk untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada Rencana Induk. Hingga akhir masa jabatan Bang Ali, otorita pengembangan proyek terdiri dari: Otorita Ancol, Badan Pelaksana Otorita Pluit, Yayasan Pulo Mas, Badanb Pelaksana Cempaka Putih, Badan Pelaksana Otorita Pondok Pinang, dan Badan Pelaksana Otorita Sunter. ■ Hendrajit

Teater Besar di Trunojoyo

Tinggal hitungan bulan, pergantian Kapolri baru bakal segera dilakukan di institusi kepolisian. Pergantian Kapolri baru, tentunya diharapkan berjalan mulus tanpa adanya saling sikut atau ajang saling unjuk gigi.

Seperti menilai dalam porsu sebuah pertunjukan teater besar, dimana sang aktor harus mahir memerankan sebuah karakter. Maka pertunjukan sebuah teater itu pun akan berhasil menyita perhatian publik.

Seperti yang terjadi belakangan ini, para petinggi Polri saling menunjukan kelihaiannya dalam perhelatan penangkapan kelompok teroris di Sarinah, Thamrin Jakarta Pusat pada 14 Januari 2014.

Tito Karnavian mantan Kapolda Metro Jaya ikut serta memantau

penyergapan kelompok teroris di pusat jantung Kota DKI Jakarta tersebut. Kemudian, ada pula Komjen Budi Gunawan, yang tiba-tiba nongol di lokasi tersebut. Entah, apakah itu salah satu bentuk mencari perhatian publik atau bukan, yang pasti mereka terlihat saling unjuk gigi didepan publik.

Namun demikian, keputusan akhir bukan lagi pada sang aktor yang telah memainkan karakternya dalam sebuah pertunjukan akbar itu. Ada sang sutradara yakni presiden yang akan menentukan siapa aktor utama yang layak untuk mendapatkan peran utama tersebut. Karena, pada akhir cerita Presiden selaku sutradara dalam memutuskan pilihannya, siapa aktor utama yang layak.

Sebab segala kemungkinan bisa terjadi dalam menduduki kursi satu di kepolisian. Seperti halnya,

kalau kita menilik pada tahun 2010, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) ketika itu sudah menyiapkan Kalemdikpol Komjen Imam Sudjarwo, dan Irwasum Nanan Sukarna sebagai calon kuat Kapolri, tetapi apa daya pada tanggal 4 Oktober 2010 terjadi beberapa kejutan sekaligus.

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang ketika itu akan mengikuti rapat kabinet di Istana Negara, tiba-tiba harus kembali ke Mabes Polri untuk melantik Irjen Timur Pradopo menjadi Kabaharkam dengan pangkat Komjen.

Timur Pradopo yang baru empat bulan menjadi Kapolda Metro Jaya itu mengaku kaget karena baru tahu penaikan pangkatnya pada hari itu. Belum hilang ingatan masyarakat, malam hari itu juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memberi tahu DPR secara resmi bahwa Timur Pradopo adalah calon tunggal Kapolri 2010.



Irjen Polisi Tito Karnavian mengikuti upacara pengucapan sumpah jabatan sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/3).

Kembali ke masa kini, apakah Presiden Jokowi selaku sutradara bisa meracik secara halus, atau malah sebaliknya menyajikan antiklimaks dalam perhelatan tersebut?

Mengingat kejadian tahun 2010, saat ini pun terjadi hal yang sama meski tak serupa dalam posisi. Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian secara mengejutkan dimutasi menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggantikan Komjen Pol Saud Usman Nasution. Sedangkan Saud Usman Nasution dimutasi menjadi Perwira Tinggi Mabes Polri.

Tito tadinya memiliki pangkat bintang dua, otomatis saat ini sudah mendapati bintang tiga. Padahal, Tito belum genap setahun menduduki jabatan sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Akankah, Tito dipilih menjadi Kapolri 2016? Karena pada Juli mendatang bakal ada sosok baru memimpin kepolisian.

Pria kelahiran Palembang,

Sumatera Selatan, 26 Oktober 1964 itu pun terbilang singkat (istimewa) dalam merengkuh jabatan. Terlebih, posisinya saat ini sudah menjadi Komisaris Jenderal yang sebelumnya Inspektur Jenderal, dan kini setara dengan Komjen Budi Gunawan, yang saat ini mengemban tugas sebagai Wakapolri.

Semasa mengabdikan di kepolisian, prestasi pria berusia 51 tahun itu pun cukup membanggakan. Dia, perwira Polri yang ikut bergabung dengan tim yang berhasil membongkar jaringan teroris pimpinan Noordin Moch Top. Tito naik pangkat menjadi Brigjen Pol dan naik jabatan menjadi Kepala Densus 88 Antiteror Mabes Polri.

Selepas itu, dia menggantikan Saud Usman Nasution, yang menjabat Direktur I Keamanan dan Transnasional Bareskrim Mabes Polri. Sekarang melalui TR Kapolri 14 Maret 2016, Tito pun kembali menggeser Komjen Pol Saud Usman Nasution, yang sedang mengemban

tugas sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Tito menjadi Angkatan AKABRI 1987 pertama yang telah mampu menembus pangkat jenderal bintang tiga. Terlebih, yaitu tadi, Tito termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa saat tergabung dalam tim Bareskrim, yang melumpuhkan teroris Dr Azahari dan kelompoknya di Batu, Malang, Jawa Timur, 9 November 2005.

Dia mendapat penghargaan dari Kapolri saat itu, Jenderal Sutanto bersama dengan para kompiatriotnya, Idham Azis, Petrus Reinhard Golose, serta Rycko Amelza Dahniel, dkk.

Meski memiliki prestasi yang begitu singkat dan membanggakan, tentunya, perjalanan Tito menuju kursi 1 di kepolisian tak akan semulus merengkuh jabatan yang telah didapatnya. Mengingat masih ada Komjen Pol Budi Gunawan, selaku angkatan tertua dalam kepolisian.

Sebenarnya, jabatan Kapolri



bagi Komjen Budi Gunawan sudah hampir direngkuh pada tahun 2015. Namun, pencalonannya itu terganjal, karena disematkan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus kepemilikan rekening gendut.

Nah, dalam perebutan kursi satu di kepolisian, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Karena, yaitu tadi sang aktor pastinya bakal menunjukkan segala keahliannya dalam merebutkan juara sebagai pemeran utama.

Tidak tertutup kemungkinan Komjen Pol Budi Gunawan pun bisa menduduki kursi satu di Korps Bhayangkara di tahun ini, karena dia merupakan orang kesayangan partai penguasa di Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 11 Desember 1959 itu pun memiliki segudang prestasi dalam kancah kepolisian RI ini.

Budi Gunawan pernah menjabat sebagai orang nomor satu di Lemdikpol menggantikan Komjen Pol Oegroseno, yang menjadi Wakapolri. Pada saat berpangkat Komisaris Besar, dia pernah menjabat sebagai Ajudan Presiden RI pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Dia tercatat sebagai jenderal termuda di Polri saat dipromosikan naik pangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal dengan jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karyawan Mabes Polri.

Setelah itu, pria 56 tahun itu menjabat Kepala Selapa Polri, lembaga yang menginduk pada Lemdikpol selama 2 tahun. Kemudian dipromosikan menjadi Kapolda Jambi yang merupakan Polda tipe B. Tak lama menjabat sebagai Kapolda tipe B, kemudian dia dipromosikan naik pangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Pembinaan Hukum (Kadiv BinKum). Dia pun sempat mutasi dengan jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) dan menjabat di kewilayahan sebagai Kapolda Bali yang merupakan Polda tipe A.

Akhirnya tak lama kemudian tanda pangkat bintang tiga pun disematkan di pundaknya, akhirnya dia meraih pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) ketika dipromosikan dengan jabatan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol), yang membawahi lembaga-lembaga pendidikan seperti Akademi Kepolisian (Akp), Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (SESPIM), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), dan lainnya.

Seperti menilai posisi catur, pihak mana yang unggul padahal masih jauh dari babak akhir. Apalagi dalam hal ini pemerannya sangat banyak dan sangat dinamis dari waktu ke waktu. Tak hanya Tito dan Budi Gunawan, Komjen Polisi Budi Waseso pun digadang-gadangkan bakal ikut dalam teater besar itu.

Pria kelahiran Pati, Jawa Tengah, 19 Februari 1961 itu pun memiliki segudang prestasi. Terutama dia mulai tersohor, ketika menduduki kursi di Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Dia mengungkap kasus korupsi terbesar, yakni penjudian kondensat bagian negara yang melibatkan SKK Migas dan PT TPPI.

Namun demikian, perjalanan Budi Waseso tak semulus seperti yang diperkirakan. Karena, setelah berhasil membongkar kasus besar itu. Pria yang biasa disapa Buwas itu dimutasi menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional, tukar posisi dengan Komisaris Jenderal Anang Iskandar.

Budi, lulusan Akademi Kepolisian

(1984) ini berpengalaman dalam bidang reserse. Buwas merupakan menantu mantan Kapolda Bali dan Kapolda Jatim Letnan Jenderal Pol (Purn) Pamudji, yang terakhir menjabat Deputy Kapolri tahun 1980-an (setara Wakapolri).

Sebenarnya masih banyak bintang-bintang besar, yang bakal ikut dalam perhelatan teater di tubuh Polri itu. Seperti halnya, Komjen Pol Syafruddin. Pria kelahiran Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 14 April 1961 itu pun sangat berpengalaman sebagai Ajudan Wapres RI 2004-2009, Kapolda Kalimantan Selatan 2010-2012, Kadiv Propam Polri 2012-2015 dan Kalemdikpol 2015-sekarang. Kelebihannya, dia dekat Jusuf Kalla dan Budi Gunawan. Kekurangannya, dia belum pernah menjadi Kapolda Tipe A atau Tipe A-K (A+).

Irjen Pol Unggung Cahyono Lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 9 April 1961. Berpengalaman sebagai Kapolda Kalimantan Barat 2011-2012, Kakor Brimob Polri 2012-2013, Kapolda Jawa Timur 2013-2014 dan Kapolda Metro Jaya 2014-sekarang. Kelebihannya, dia memiliki jabatan-jabatan bergengsi sebelum mencapai bintang tiga.

Irjen Pol Mochammad Iriawan Lahir di Jakarta, 31 Maret 1962. Berpengalaman sebagai Wadir I/Kamtranas Bareskrim Polri 2009-2010, Kapolda Nusa Tenggara Barat 2012-2013 dan Kapolda Jawa Barat 2013-sekarang.

Irjen Pol Anas Yusuf Lahir di Brebes, Jawa Tengah, 11



Budi Gunawan

September 1960. Berpengalaman sebagai Dir Tipiter Bareskrim Mabes Polri 2011-2012, Kapolda Kalimantan Timur 2012-2013, Wakabareskrim Polri 2013-2014 dan Kapolda Jawa Timur 2014-sekarang.

Komjen Pol Putut Eko Bayuseno Lahir di Tulung Agung, Jawa Timur, 28 Mei 1961. Berpengalaman sebagai Ajudan Presiden RI 2004-2009, Kapolda Banten 2011, Kapolda Jawa Barat 2011-2012, Kapolda Metro Jaya 2012-2014 dan Kabaharkam 2014-sekarang. Pernah bersinar sangat terang, tapi kini tanpa daya dorong dari SBY, dia praktis seperti kehabisan bensin.

Komjen Pol Suhardi Alius Lahir di Jakarta, 10 Mei 1962. Berpengalaman sebagai Kadiv Humas Polri 2012-2013, Kapolda Jawa Barat 2013, Kabareskrim Polri 2013-2015, dan (Sekretaris Utama Lemhanas 2015-sekarang). Dulu pernah melejit bagai meteor, tapi kini setelah ditempatkan di luar institusi Polri, tipis kemungkinan dia akan ditarik kembali. Kalaupun akan dimutasi, dia mungkin akan digeser ke BNN yang juga di luar institusi Polri.

Sampai paragraf di atas, semua data dan alasan jelas. Tapi yang akan terjadi belum tentu sesuai dengan alur yang baku. Cerita yang sudah dikemas pun bisa keluar pakem dari kaedah. Isi paragraf ini akan bertentangan dengan uraian runtut di atas. Intinya, tidak tertutup kemungkinan Komjen Pol Tito Karnavian, Komjen Pol Budi Gunawan dan Komjen Pol Budi Waseso yang akan menjadi Kapolri 2016.

Sebagai gambaran, pada pemilihan Budi Gunawan sebagai calon Wakapolri, semua calon lainnya mundur memberi jalan kepada Budi Gunawan sebagai calon tunggal. Sementara Budi Gunawan sendiri merupakan anggota Wanjakti. Hanya presiden selaku sutradara yang bisa menentukan hasil akhirnya.

Belum Ada Pembahasan soal Kapolri Baru

Gerbong petinggi polisi pun sudah

mulai bergerak dengan bertambahnya koleksi bintang dipundak Tito Karnavian. Juga termasuk pejabat Polri lainnya untuk menduduki posisi penting di struktur dalam maupun luar Mabes Polri. Tetapi, menariknya, sejauh ini baik dari internal kepolisian melalui Wanjakti, atau lembaga terkait yang menjadi bagian dalam proses seleksi calon Kapolri belum melakukan pembahasan mengenai hal tersebut.

Kompolnas misalnya, instansi pemerintah yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan serta pertimbangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, sampai saat ini belum tampak pergerakannya. Terlebih, hingga kini pihak istana belum memberikan sinyal mengenai hal ini.

“Calon Kapolri sampai sekarang belum ada. Biasanya kalau istana sudah ada bicara dulu baru kita respon,” ujar Anggota Kompolnas Edi Saputra Hasibuan Aktual.com melalui sambungan telepon, Jakarta, Minggu (13/3).

Dia menganggap, belum tepat jika pembahasan seleksi tersebut dilakukan sekarang ini. Alangkah eloknya kata Edi, biarkan Badrodin Haiti menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pimpinan Polri. Dia beralasan masa bakti Kapolri masih menyisakan empat bulan terhitung Maret bulan ini.

Apalagi, bisa saja pucuk pimpinan di kepolisian tetap dipegang oleh Badrodin Haiti. Terlebih, ada keputusan baru perihal masa jabatan bagi prajurit tamtama, bintara, perwira pertama, menengah, serta tinggi ini. Mengacu pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menkopolkam, Panglima TNI, Kapolri serta para kepala staf tiga angkatan disebutkan, bahwa masa jabatan bagi prajurit tamtama, bintara, perwira pertama dan menengah menjadi maksimal 58 tahun.

Hal tersebut berlaku mulai Januari 2016. Sementara masa

purna bagi perwira tinggi menjadi maksimal 60 tahun. Untuk konteks birokrasi peraturan itu bisa dilakukan. Termasuk di kepolisian maupun TNI dengan menyesuaikan keadaan menurut kebutuhan lembaga berdasarkan kompetensi. Tentunya, hal ini nantinya bakal menjadi ganjalan bagi mereka, yang akan ingin menduduki kursi satu Korps Bhayangkara tersebut.

Presiden yang Bakal Menentukan

Sebagai partai penguasa sudah tentu punya kepentingan dalam bursa pemilihan Kapolri. Partai berlambang banteng moncong putih itu berharap, Kapolri terpilih nanti dapat mendukung program pemerintah dalam menjalankan Nawa Cita yang menjadi slogan Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Untuk mengemban tugas nantinya, Kapolri harus berintegritas tinggi didukung dengan kapabilitas yang teruji. Selain itu, dapat diterima oleh internal maupun eksternal Polri. Sebab, bagaimana pun, hal itu adalah salah satu syarat yang nantinya harus dipegang oleh Kapolri baru. Karena, sebagai pucuk tertinggi di kepolisian harus mampu menyelesaikan persoalan saat ini. Sehingga dibutuhkan figur yang mempunyai baik dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan Polri maupun melayani masyarakat.

“Tugas penting bagi Polri dalam masyarakat yang kompleks seperti sekarang membutuhkan figur yang mempunyalah,” kata Ketua bidang Perekonomian DPP PDIP periode 2015-2020, Hendrawan Supratikno ketika dihubungi.

Namun demikian, pihak PDI-P menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden selaku sutradara dalam mengambil sebuah kebijakan dalam pemilihan bursa Kapolri. Sebab, Presiden dalam hal ini pasti mempunyai sosok yang tepat untuk menggantikan Badrodin Haiti. Sebelum mengerucutkan ke salah satu nama, Presiden akan membuat daftar panjang para kandidat terbaik yang dimiliki Polri. • *Nebby-Wisnu-Butho*

KPK Sebut Ahok Tabrak Aturan Sumbangan Dana Kampanye

Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut cara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meraup sumbangan dana kampanye, telah menyalahi aturan Komisi Pemilihan Umum.

Wakil Ketua KPK Laode Syarif menjelaskan, modus Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 silam, yang salah aturan itu jadi suatu bahan studi untuk memantau penyelenggaraan Pilkada 2017 dan 2018 mendatang.

“Itu salah satu modus operandi yang ditemukan oleh studi KPK. Dan itu salah,” kata dia saat dikonfirmasi, Selasa (22/3).

Sebelumnya, Gubernur DKI itu memang secara gamblang menerima sumbangan dana kampanye dari petinggi PT ABC Grup Hamid Djojonegoro. Total sumbangannya pun cukup besar yakni Rp 4,5 miliar.

Karena ada batasan nominal sesuai peraturan KPU, maka Hamid memecah sumbangan tersebut dengan menggunakan sembilan perusahaan yang masing-masing berjumlah Rp 500 juta.

Dalam aturannya, KPU menetapkan batasan orang perorang atau badan hukum maupun perusahaan untuk memberikan sumbangan dana kampanye. Untuk perorangan, mereka bisa menyumbang maksimal Rp 50 juta, sedangkan untuk korporasi sebanyak Rp 500 juta.

Hal itu pun membuat KPK memberikan rekomendasinya kepada KPU. Pihak Laode menyarankan agar lembaga pimpinan Husni Kamil Manik dengan merujuk modus yang dipakai Ahok.

“Kami minta KPU untuk mencermatinya dengan seksama agar tidak terjadi lagi.”

Kendati demikian, Syarif mengaku pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyikapi hal tersebut. “Itu ranah nya KPU untuk lebih teliti ke depan.” /Wisnu Yusep

Kapolri Pastikan Jatuhnya Helikopter Bukan Serangan Kelompok Santoso Cs

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memastikan, insiden jatuhnya helikopter milik TNI AD di Poso, Sulawesi Tengah, Minggu (20/3), bukan serangan dari kelompok teroris Santoso Cs.

Menurut dia, kecelakaan terjadi lantaran akibat dari cuaca buruk. “Kalau serangan dipastikan tidak ada karena itu bukan daerah rawan tapi pemukiman dekat bandara,” kata Badrodin di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/3).

Ada 13 prajurit TNI ditargetkan mendarat di Stadion Poso yang berada di Kecamatan Poso Pesisir, Poso, Sulawesi Tengah. Menurut Badrodin, ke-13 prajurit TNI itu baru saja bertugas di Desa Napu, Poso.

“Informasi yang diterima habis melaksanakan briefing di Napu kemudian akan kembali ke Poso dan



itu sudah masuk ke kota Poso.”

Sebelumnya diketahui, helikopter tersebut ditumpangi oleh 13 prajurit TNI. Sebagiannya bahkan berstatus sebagai anggota Kopassus. Mereka berangkat dari Desa Napu sekira pukul 17.20 WITA. Rencananya helikopter tersebut tiba di stadion Poso pukul 17.50 WITA.

Namun sayang, heli yang mereka tumpangi jatuh karena faktor cuaca sehingga menyebabkan alutsista asal Kanada itu karam di atas perkebunan di Kecamatan Poso Pesisir, Poso, Sulawesi Tengah petang kemarin.

/ Wisnu Yusep



Kapolri Resmi Lantik Tiga Kapolda

Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti melantik tiga Kapolda baru di Rupatama Mabes Polri, Senin (21/3).

Pelantikan tiga Kapolda yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Moechgiyarto menggantikan Kapolda Metro sebelumnya, Irjen Tito Karnavian menjadi Kepala BNPT.

Kemudian Kapolda Jawa Barat,

Irjen Jodie Rooseto yang sebelumnya, Widyasiwara Utama Sespim Polri Lemdikpol. Dan Kapolda Riau Brigjen Supriyanto yang menggantikan posisi kapolda sebelumnya, Brigjen Dolly Bambang Hermawan.

Selanjutnya, Brigjen Dolly Bambang Hermawan akan menempati posisi Widyasiwara Utama Sespim Polri Lemdikpol menggantikan posisi Irjen Jodei Rooseto. / Wisnu Yusep

KPK: Kami Tidak Diam di Kasus RS Sumber Waras



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara lantaran terus dinilai lambat menaikkan status kasus pengadaan tanah RS Sumber Waras dari penyelidikan ke penyidikan.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha bahkan meminta pihak yang mengkritik itu untuk menjelaskan, mengapa mereka menilai penanganan kasus tersebut lamban.

“Tanggapannya pertama, hitungan lambat atau cepatnya itu seperti apa, bisa disebutkan nggak contoh,” kata Priharsa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/3).

Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak ada niat sedikit pun untuk mengulur penanganan kasus yang diduga merugikan negara Rp 191 miliar itu. Tim penindakan Kpk, tutur dia, akan terus mengusut kasus tersebut.

“Sebelumnya kan sudah ditekankan bahwa KPK tidak diam. Dan memang untuk kepentingan penyelidikan tidak disampaikan kepada publik,” paparnya.

KPK sendiri telah menaikkan status kasus RS Sumber Waras dari tahap pengumpulan bahan dan keterangan, ke penyelidikan di akhir Desember 2015 lalu. Hal itu ditandai dengan penyerah hasil audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam perkembangannya, lembaga antirasuah telah meminta keterangan setidaknya terhadap 33 orang. Salah satu yang telah dimintai keterangan adalah Ketua Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN) I Wayan Suparmin. /Nebby

Proyek Hambalang akan Dilanjutkan, Nazar: Masih Ada yang Harus Bertanggungjawab

Muhammad Nazaruddin, yang merupakan terpidana tujuh tahun perkara suap Wisma Atlet SEA Games XXVI Palembang mengungkapkan, bahwa masih ada beberapa sejumlah pihak yang belum terjerat di kasus Hambalang.

Hal itu dia ungkapkan, seiring dengan wacana pemerintah Jokowi-JK yang diduga akan meneruskan pembangunan proyek bersamalah di era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

“Menurut saya ada beberapa orang yang cukup bertanggungjawab untuk Hambalang yang sampai saat ini belum jadi tersangka. Ada beberapa orang sementara dia sebenarnya salah satu aktor utama membuat permainan-permainan yang terjadi di Hambalang itu,” ujar Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu (23/3).

Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu pun menyebut, bahwa pihak yang bertanggungjawab atas kasus tersebut seperti di Kemenporanya Wafid Muharam yang sampai sekarang tidak menjadi tersangka.

“Padahal ‘kan dia yang tanda tangan semua. Terus yang di DPR seperti Mirwan Amir (anggota Fraksi Partai Demokrat) dan beberapa nama lain, yang sebenarnya terlibat menikmati bukan membangun programnya tapi menikmati dari program pemerintah yang bagus.”

Dia pun mendukung wacana pemerintahan Jokowi-JK, yang akan melanjutkan program era SBY tersebut. “Niatnya baik untuk kemajuan olahraga, uang negara sudah dikeluarkan kalau disia-siakan sangat sayang. Itu ‘kan uang rakyat harus dimanfaatkan. Prinsipnya siapa pun pemerintah harus melanjutkan program itu uang negara sudah dikeluarkan sayangkan asetnya rusak.”

Namun dia kembali melempar tanggung jawab persoalan itu kepada

mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. “Tanya ke mas Anas. Inisiatifnya semua mas Anas. Semuanya ada mas Anas. Terus tanya macam mana komitmen soal di Monas. Kan sudah dibersihkan Jokowi.”

Padahal sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi sempat menilai proyek itu tidak layak untuk dilanjutkan.

“Sebenarnya lokasi tersebut tidak layak untuk dilakukan pembangunan, dan harus ditinjau kembali kelayakannya,” kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati pada Jumat (18/3).

Kasus ini sudah menjerat sejumlah pihak, yaitu mantan Menpora Andi Mallarangeng selaku Pengguna Anggaran, dan mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen saat proyek Hambalang dilaksanakan.

Selain itu, mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (Persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang semuanya sudah dipenjara hingga adik Andi Mallarangeng Choel Mallarangeng yang saat ini masih berstatus tersangka di KPK.

Sedangkan dalam sejumlah putusan kasus Hambalang menunjukkan, hasil penelitian tim tanggap darurat yang dibentuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM menunjukkan longsor disebabkan sifat batuan di lokasi berupa tanah lempung mudah mengembang dan terjadi gerakan tanah.

Hal itu sebenarnya sudah diketahui saat perencanaan konstruksi berdasarkan hasil “soil investigation” perusahaan subkontraktor PD Laboratirum Teknik Sipil Geoinves yang menunjukkan tanah Hambalang bersifat *cemented clay*.

Selain itu, lokasi Hambalang berada dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi sebagaimana Peta Rawan Bencana yang diterbitkan oleh PVMBG. /Wisnu Yusep

Utang dari China

Berujung ke Taipan?

Asal muasal fasilitas pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai total sekitar USD3 miliar atau setara dengan sekitar Rp40 triliun berawal dari peninjauan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Kala itu, pada akhir bulan Juni 2015, menteri Rini mengatakan di depan Komisi VI DPR bahwa dirinya sedang melakukan peninjauan pinjaman CDB, belum ada penandatanganan MoU. Namun dirinya berkomitmen pinjaman dari CDB tersebut untuk pembangunan infrastruktur nasional.

“Belum ada penandatanganan tapi komitmen CDB cukup bagus. Ini murni fasilitas pembiayaan selain meningkatkan penyaluran perbankan itu, juga untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur,” kata Menteri BUMN Rini M Soemarno, di sela Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Selasa (30/6).

Dalam Raker tersebut, dijabari kemungkinan masing-masing Bank BUMN mengajukan pinjaman sebesar USD1 miliar. Peninjauan pinjaman tersebut bagian dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian BUMN dengan National Development Reformation Commission (NDRC), saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok pada Februari 2015.

Dalam MoU tersebut diperoleh komitmen pinjaman dari dua lembaga keuangan Tiongkok yaitu CDB dan Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) masing-masing USD20 miliar atau total keduanya USD40 miliar. Dalam kerja sama itu ditekankan bahwa pembiayaan tersebut direkomendasikan kepada perusahaan terbaik sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Bahkan Menteri Rini menguatkan pinjaman dari CDB dan

ICBC akan digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur.

“CBD dan ICBC siap memberikan semacam *standby loan* untuk proyek-proyek infrastruktur yang digarap antara BUMN RI dengan BUMN China,” tegas Rini.

Dicontohkan, CDB sudah MoU dengan PT PLN (Persero) untuk membiayai pembangunan pembangkit di Cilacap dengan nilai investasi sekitar USD10 miliar. Selain PLN juga sedang dalam proses peninjauan membiayai proyek bauksit milik PT Antam Tbk, di Kalimantan.

Rini juga menjelaskan, bahwa komitmen pendanaan tersebut tidak ada jaminan dari pemerintah. Semua kerjasama adalah murni bisnis atau “*business to business*” antara pihak BUMN terkait. Ada tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI yang akan menerima pinjaman masing-masing USD1 miliar. Salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Haru Koesmahargo mengatakan pinjaman akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur baru yang menjadi prioritas pemerintah seperti kereta *Light Rail Transit* (LRT), pelabuhan, hingga jalan tol.

“Ketiga proyek yang dibiayai beda-beda. Salah satunya adalah LRT. Nanti *lead*-nya beda-beda. Nanti juga biayai *toll road* sama pelabuhan,” ujar Haru Koesmahargo di Jakarta, Senin (13/7).

Pinjaman senilai USD1 miliar tersebut masih dalam pembahasan di meja Kementerian BUMN. Namun *Rate* bunga masih belum bisa ditentukan. Pinjaman tersebut akan berbentuk valuta asing yakni China Yuan Renminbi (RMB), dan dolar Amerika Serikat (AS). Adapun tenor yang diberikan oleh CDB selama 10 tahun.

“Jadi porsi 70% pakai dolar AS



dan 30% pakai Renminbi. Murni bisnis *to business*, tanpa jaminan pemerintah,” tuturnya.

Sedangkan sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas menjelaskan bahwa CDB memberikan syarat jika pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dengan dana besar dan berjangka panjang.

Pinjaman CDB tersebut akhirnya direalisasikan pada Rabu pukul 19.00 (waktu setempat) 16 September 2015 di Beijing, Menteri BUMN, Rini M. Soemarno bersama dengan Chairman National Development and Reform Commission (NDRC) Mr. Xu Shaoshi, menyaksikan penandatanganan pinjaman dana dari CDB. Menindaklanjuti penandatanganan pinjaman tersebut, akhirnya pada 1 Oktober, Komisi VI DPR memanggil



(kiri-kanan) Dirut Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, Direut BRI Asmawi Syam, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo, serta Dirut BNI Achmad Baiquni mendengarkan pertanyaan anggota Komisi VI DPR dalam rapat dengar pendapat di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/3). Rapat tersebut membahas dana pinjaman dari China Development Bank (CDB) sebesar 3 miliar dolar Amerika kepada tiga bank BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk.

Menteri Rini untuk mendengarkan secara langsung perihal pinjaman CDB senilai USD3 miliar.

“Saya jelaskan soal pinjaman. Pinjaman CDB kepada BNI, BRI dan Mandiri adalah tindak lanjut dari MoU antara Presiden Jokowi dengan RRC. MoU tersebut berisikan program berjasa di berbagai bidang termasuk infrastruktur,” kata Rini.

Ia menjelaskan, pinjaman ini merupakan transaksi (B to B) bernilai USD 3 miliar, masing-masing BUMN mendapat USD 1 miliar dengan struktur 70 persen pinjaman dalam bentuk USD dan 30 persen pinjaman dalam bentuk remimbi.

“Tenor 10 tahun dan *clean based* tanpa jaminan. Pinjaman ini adalah kesempatan baik. Pinjaman ini akan menambah daya dukung bank BUMN untuk mendanai ekspor,” ungkapnya.

Namun, dalam perjalanan utang tersebut, berbagai kalangan menilai ada beberapa kejanggalan. Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengatakan sebelum tiga bank pemerintah melakukan utang ke China, ternyata telah menunjuk bakal penerima atau nasabah.

“Ini kontraktornya si A, si B, si C kemudian duitnya masuk dari China lalu bank kita menyalurkan kepada calon kontraktor tersebut. Kami memandang ini tidak baik bagi dunia perbankan, ini menunjukkan ada investasi semu dibalik semua ini,” ungkap Hafisz Tohir.

Tidak hanya itu, peruntukan uang tersebut juga telah ditentukan hanya pada proyek infrastruktur dan migas saja, sehingga tidak ada ruang gerak kebebasan bagi bank untuk melakukan pendanaan

secara fleksibilitas. Dirinya saat itu mengaku belum mendapatkan siapa saja nasabah yang sudah menerima, namun menurutnya dana tersebut sudah hampir 100 persen tersalurkan.

“Per Desember sudah cair semua USD3 M masuk ke 3 bank itu, bahkan 2 bank diantaranya sudah menyalurkan uang tersebut ke nasabah, 1 bank lagi sudah cair 89 persen, tinggal 11 persen lagi,” jelasnya.

Ketua Komisi XI DPR, Achmadi Noor Supit mengungkapkan dari nama-nama debitur yang mendapat kucuran dari dana pinjaman China itu hanya untuk perusahaan tertentu yang pemiliknya itu-itulah saja.

“Jika kami lihat nama-nama debitur yang saya baca justru pemiliknya itu ya orang itu-itulah juga. Ini jadi aneh. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Jangan-jangan memang hal ini semua diurus oleh pihak tertentu. Bahkan tiga bank itu pun mengurus pinjaman tersebut bisa jadi diurus pihak lain itu. Jangan sampai pinjaman ini bukan *by design* oleh pihak tertentu, sehingga lagi-lagi hanya untuk nasabah besar,” ujar Achmadi Noor Supit saat raker dengan tiga bank BUMN di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/3).

Dari beberapa nama perusahaan yang mendapat kredit dana utangan dari China, ternyata terdapat nama-nama perusahaan milik Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Arifin Panigoro. Hal ini seolah menjadi semakin kuatnya adanya ‘sesuatu’ dibalik penyaluran dana hasil utangan dari CDB kepada tiga bank BUMN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing USD1 miliar.

Daftar penerima utang CDB

Bahkan ada satu perusahaan mendapat kucuran pinjaman dari ketiga bank, yakni PT Indah Kiat. Perusahaan yang bergerak di sektor pulp and paper sepertinya jauh dari konteks pembangunan infrastruktur.

“Namun kami tidak bisa tanya ke mereka (direksi ketiga bank itu). Karena ketiganya hanya pelaksana. Yang dibelakangnya itu pemerintah, bisa jadi Menteri BUMN,” tukas anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan debitur yang patut dicurigai menerima pinjaman dari hasil utangan itu adalah perusahaan PT Indah Kiat.

“Dari ketiga bank itu semuanya memberi kredit ke Indah Kiat. Kok tiga-tiganya ada Indah Kiat-nya (di daftar debitur). Terus mana untuk infrastrukturnya? Ini ada apa?” tegasnya.

Direktur PT BRI, Asmawi Syam menegaskan, alasan adanya perusahaan kertas mendapat kredit karena tujuan pinjaman ini, selain untuk infrastruktur juga untuk menggenjot perdagangan.

“Jadi tujuan pinjaman ini pengucuran kreditnya tidak hanya untuk infrastruktur tapi juga perdagangan, makanya kami bertiga (BRI, Mandiri, dan BNI) mengucurkan kredit ke sektor manufaktur,” dalihnya.

Sedangkan Direktur Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin beralih, alasan debitur tersebut mendapat kucuran kredit itu karena untuk menghindari risiko.

“Jadi kami hanya mengutamakan nasabah *existing* yang sudah lama. Ini agar risiko kreditnya lebih kecil,” kata dia.

PT Indah Kiat memang mendapat kucuran kredit dari BRI sebanyak US\$ 175 juta, dari Mandiri sebesar US\$ 50 juta, dan dari BNI sebanyak Rp1,067 triliun. PT Indah Kiat merupakan salah anak perusahaan Sinarmas grup yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode INKP. PT. Indah Kiat Pulp &

Alokasi Kredit & Posisi Jani					
No	Bank	Nama Debitur	Bidang Usaha	USD	Plafon
				(4)	IDR (Milyar) (5)
(1)		(2)	(3)		(6)
1	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	PT. Poso Energy Satu Pamona	Energi (Power Plant)	143.110.000	-
2		PT. Bosowa Energi	Energi (Power Plant)	90.893.644	-
3		PT. Kertanegara Energi Perkasa	Energi (Power Plant)	85.929.760	-
4		PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk	Manufaktur (Baja)	110.000.000	-
5		PT. Pindo Deli	Manufaktur (Pulp and Paper)	221.000.000	-
6		PT. Indah Kiat	Manufaktur (Pulp and Paper)	175.000.000	-
7		PT. Semen Bosowa	Manufaktur (Semen)	55.697.870	-
8		PT. Tangki Merak	Manufaktur (Minyak Bumi)	75.000.000	-
9		PT. Sugar Labinta	Perkebunan (Gula)	43.368.726	-
				1.000.000.000	-
1	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	PT. Medco E&P Tomori Sulawesi	Minyak dan Gas	50.000.000	-
2		PT. Pupuk Kalimantan Timur	Industri Pupuk	37.878.785	-
3		PT. Medco Energy International, Tbk	Minyak dan Gas	245.000.000	-
4		Armada Maritim Offshore	Angkutan Laut (Tanker)	10.500.000	-
5		Sumber Petirinda Perkasa	Penyaluran Gas Bumi	30.371.215	-
6		Dian Swastatika Sentosa	Power Plant	100.000.000	-
7		Indah Kiat Pulp and Papers	Pulp, Paper, Tissue and Corrugated	50.000.000	320.000.000
8		Pindo Deli Pulp and Papers	Paper, Tissue and Corrugated	15.000.000	96.000.000
9		PT. Medco Energi Internasional	Minyak dan Gas	100.000.000	-
10	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	PT. Agincourt Resources (QQ Marlin Enterprises Limited)	Pertambangan	105.250.000	-
11		Saka Energy Indonesia	Minyak dan Gas	100.000.000	-
12		Induka Energy	Pertambangan	90.000.000	-
				935.000.000	416.000.000
1		Perum Perumnas	Konstruksi	-	100
2		Semen Indonesia (Persero), Tbk	Industri Pengolahan	-	200
3		PT. PANN Pembiayaan Maritim (Persero)	Industri Pengolahan	-	272
4		PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Listrik, Gas, & Air	-	2.500
5		PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Listrik, Gas, & Air	-	866
6		PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk	Konstruksi	-	50
7		PT. Waskita Beton Precast	Konstruksi	-	481
8		PT. Jasa Marga Bali Tol	Konstruksi	-	138
9		PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang	Industri Pengolahan	-	98
10		PT. Petrokimia Gresik	Industri Pengolahan	-	3.166
11		PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	Pengangkutan, Pergudangan, & Komunikasi	-	323
12		PT. Cemindo Gemilang	Industri Pengolahan	-	63
13		PT. Sinar Tambang Arthalesteri	Industri Pengolahan	-	108
14		Wintemar Offshore Marine	Pertambangan	-	420
15		Citra Citi Pacific	Konstruksi	-	242
16		PT. Indosat Tbk	Pengangkutan, Pergudangan, & Komunikasi	-	500
17		Misi Mulia Petronusa	Listrik, Gas, & Air	-	680
18		PT. Kertanegara Energi Perkasa	Listrik, Gas, & Air	-	472
19		PT. Ketapang Arya Power	Listrik, Gas, & Air	-	22
20		PT. Priamanaya Energi	Listrik, Gas, & Air	-	571
21		PT. Rayon Utama Makmur	Industri Pengolahan	-	132
22		PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	Industri Pengolahan	-	271
23		PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	Industri Pengolahan	-	1.067
24		PT. Daya Radar Utama	Industri Pengolahan	-	233
25		PT. Borneo Khatulistiwa Palma	Pertanian, Perburuan, & Sarana Pertanian	-	281
26		Tani Prima Makmur	Pertanian, Perburuan, & Sarana Pertanian	-	79
				1.935.000.000	13.335
					416.000.000

Paper Tbk merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi kertas yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1981. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam-macam kertas.

Ketua Koalisi Anti Utang (KUA), Dani Setiawan menilai pinjaman CDB mendorong bank-bank BUMN memperlakukan bisnisnya semakin jauh dari amanat konstitusi. Mereka cenderung hanya menyediakan pembiayaan bagi sektor bisnis besar saja. Kredit yang dibuat secara komersial sudah bisa dipastikan bahwa kebijakan penyaluran kredit tiga bank BUMN tersebut akan mempertimbangkan aspek-aspek komersial.

“Artinya, kucuran pinjaman CDB hanya akan dinikmati oleh proyek-proyek atau perusahaan yang berorientasi profit,” ujar Dani.

Dari beberapa nama perusahaan yang mendapat kredit dari dana utangan China, ternyata terdapat nama-nama perusahaan milik Wakil Presiden Jusuf Kalla, Arifin Panigoro dan PT Indah Kiat yang bergerak di sektor pulp and paper yang sepertinya jauh dari konteks pembangunan infrastruktur.

“Memang portofolio kredit bank-bank BUMN sejak lama sudah terlalu didominasi oleh perusahaan besar, dan itu-itu saja. Kalau tidak perusahaan migas dan pertambangan ya perkebunan, atau properti. Nah, kita tahu siapa saja taipan Indonesia yang menguasai sektor-sektor ini,” jelasnya.

Apabila melihat debitur tiga bank tersebut, ada *conflict of interest*. Selama ini, sudah terlalu banyak konglomerat menikmati kucuran kredit perbankan BUMN.

“Para Taipan ini memiliki Jaringan, kapasitas, dan lobby yang menjangkau dari level direksi, komisaris, hingga pemegang saham (pemerintah). Tetapi tidak semua usaha mereka juga sebenarnya sehat. Bank-Bank BUMN juga sudah terlalu banyak memberikan keringanan-keringan dalam pembayaran cicilan



para taipan ini, bahkan setiap tahun banyak diantara mereka yang mendapatkan pengampunan utang,” tegasnya.

Padahal, lanjutnya, mereka memungut tabungan dari masyarakat. Sementara kucuran kredit bagi usaha rakyat paling cuma 20-persenan saja. Sementara, perlakuan bank terhadap usaha rakyat tidak kurang selayaknya rentenir yang menjerat rakyat.

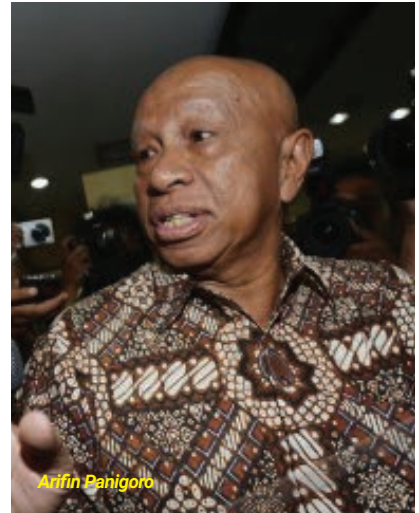
Oleh sebab itu, akan sulit mengandalkan ketiga bank ini untuk menyalurkan kredit kepada sektor usaha kecil menengah atau koperasi dengan suku bunga yang murah. Pasalnya, pihak bank akan memperhitungkan tingkat pembayaran kembali utangnya kepada kreditor China.

“Letak keasalahannya adalah pada pembuatan utang itu sendiri sejak awal, mendorong bank BUMN semakin jauh dari amanat konstitusi,” pungkasnya.

Jaminan Pemerintah

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan menuding proses pinjaman tiga bank BUMN kepada China Development Bank (CDB) tidak murni *business to business* (B to B).

Pasalnya, dalam perjanjian itu ada klausul ‘perubahan kendali’ yang melibatkan pemerintah Republik Indonesia (RI) terhadap kepemilikan



sahamnya. Sehingga sangat mungkin saham pemerintah di tiga bank itu bisa terdelusi.

“Saya rasa ini bukan B to B murni. Tapi tetap pemerintah terlibat. Saya curiga mereka kasih pinjaman untuk menguasai saham di tiga bank BUMN itu,” tandas Heri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/3).

Klausul yang dimaksud Heri menyebutkan, “Perubahan Kendali” berarti Pemerintah RI: (a) tidak lagi secara sah dan secara manfaat memiliki (baik langsung atau tidak langsung) setidaknya 51% dari saham yang diterbitkan dan modal saham yang memiliki hak suara dalam pemegang, atau (b) tidak atau tidak lagi, memiliki wewenang untuk: (i) memberikan suara, atau mengendalikan pemberian suara, setidaknya 51% dari jumlah suara maksimum yang dapat dikeluarkan pada rapat umum pemegang saham (RUPS) peminjam atau dengan cara lain mengendalikan setidaknya 51% dari hak suara dari peminjam.

Menurut Heri, perjanjian ini membahayakan bagi pemerintah, karena jika konsepnya B to B, kenapa ada perjanjian melibatkan pemerintah.

“Kalau katanya seperti itu, bukan B to B, sehingga nanti kalau mereka tidak punya uang dan diminta melunasi, bisa-bisa pemerintah juga yang disuruh melunasi,” tegas dia. ■

Ismed Eka Kusuma



Siapa Taipan di Balik Pinjaman CDB Bank BUMN?

Aliran kucuran dana pinjaman dari China Development Bank (CDB) kepada Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar USD3 miliar disinyalir terindikasi keterlibatan pemerintah secara tidak sehat. Pasalnya, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI, terdapat beberapa nama-nama debitur yang diduga didesain oleh pihak tertentu. Nama debitur tersebut lebih kepada sektor migas/pertambangan, perkebunan, atau properti.

“Memang portofolio kredit bank-bank BUMN sejak lama sudah terlalu didominasi oleh perusahaan besar, dan itu-itu saja. Kalau tidak perusahaan migas dan pertambangan ya perkebunan, atau properti. Nah, kita tahu siapa saja Taipan Indonesia yang menguasai sektor-sektor ini,” ujar Ketua Koalisi Anti Utang (KUA), Dani Setiawan kepada Aktual di Jakarta, Selasa (15/3).

Dari beberapa nama perusahaan yang mendapat kredit dana utang dari China, ternyata terdapat nama-nama perusahaan milik Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Arifin Panigoro. Bahkan ada satu perusahaan yakni, PT Indah Kiat yang bergerak di sektor pulp and paper yang sepertinya jauh dari konteks pembangunan infrastruktur.

PT Indah Kiat memang mendapat kucuran kredit dari BRI sebanyak USD175 juta, dari Mandiri sebesar USD50 juta. PT Indah Kiat merupakan salah anak perusahaan sinarmas grup yang sudah melantai

di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode INKP.

“Apabila melihat debitur bank BUMN tersebut, ada conflict of interest. Selama ini, sudah terlalu banyak konglomerat menikmati kucuran kredit perbankan BUMN,” jelasnya.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan besar milik para Taipan tentu punya akses lebih baik untuk mendapatkan kredit.

“Para Taipan ini memiliki Jaringan, kapasitas, dan lobby yang menjangkau dari level direksi, komisaris, hingga pemegang saham (pemerintah). Tetapi tidak semua usaha mereka juga sebenarnya sehat. Bank-Bank BUMN juga sudah terlalu banyak memberikan keringanan-keringan dalam pembayaran cicilan para taipan ini, bahkan setiap tahun banyak diantara mereka yang mendapatkan pengampunan utang,” tegasnya.

Padahal, lanjutnya, mereka memungut tabungan dari masyarakat. Sementara kucuran kredit bagi usaha rakyat paling cuma 20-persenan saja.

“Sementara, perlakuan bank terhadap usaha rakyat tidak kurang selayaknya rentenir yang menjerat rakyat,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi kertas yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1981. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam-macam kertas.

Kemudian perusahaan milik JK dan Arifin juga ada di daftar tersebut. Perusahaan PT Bosowa Energi mendapat kredit dari BRI sebanyak USD143 juta. Dan dari bank yang sama ada PT Semen Bosowa yang diberi pinjaman USD55,7 miliar.

Sementara perusahaan milik Arifin ada PT Medco E&P Tomori Sulawesi yang dikucuri Mandiri sebanyak USD50 juta. Dan juga ada PT Medco Energi International Tbk juga dapat kredit dari Mandiri sebanyak USD245 juta. /Ismed

Salamuddin: Proyek Infrastruktur Ala Jokowi Hanya Bagi-bagi Jatah



Arah kebijakan pemerintahan Jokowi-JK dengan melakukan pembangunan infrastruktur melalui skema pendanaan pinjaman, dinilai hanyalah cara pemerintah melakukan bagi-bagi jatah dan menjadikan keuangan negara sebagai bancakan.

Bagaimana tidak, tanpa mempertimbangkan prospek pendapatan dan keuntungan bagi negara, pemerintah melakukan pembangunan dengan pembiayaan pinjaman dari berbagai sumber dan kemudian dikembalikan dengan *cost recovery*.

“Jadi arahnya kebijakan Jokowi ini hanya mengharap *infrastructures*, mereka mau *spending* infrastruktur dan bagi-bagi jatah,” kata Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng di Jakarta, Senin (14/3).

Dia menunjukkan beberapa proyek infrastruktur yang menonjol antara lain Kasus Masela, Kereta Cepat, Listrik 35.000 MW menggunakan pola pembiayaan yang sama.

“Kasus Masela, Kereta Cepat, Listrik 35.000 MW dia menciptakan proyek kemudian dibiayai asing, dan setelah selesai dibeli oleh negara, jadi mereka menciptakan kondisi keuangan negara sebagai bancakan,” pungkas Daeng. /Arbie Marwan

Irman: Eksistensi BUMN Rontok Gara-gara UU Keuangan Negara

Walaupun membawa embel-embel milik negara, namun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlebih PT Pertamina (Persero) tidak mempunyai kekuatan dalam mengelola Migas negara lantaran pada praktiknya dan kedudukannya disamakan dengan unit usaha swasta.

Ahli Hukum Tata Negara, sekaligus pendiri SIDIN Constitution, Irman Putra Sidin mengatakan akar permasalahan tersebut disebabkan adanya kesalahan legislasi dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan BUMN hanya sebatas pelaku ekonomi, artinya tidak berbeda dari unit usaha swasta.

“Dalam UU No 17 tahun 2003 tentang BUMN, terdapat konsideran yang menyatakan bahwa BUMN adalah pelaku ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, hal ini mendegradasikan BUMN dari unit usaha atas kedaulatan rakyat menjadi sama dengan unit usaha swasta,” tuturnya di Ruang GBHN Nusantara V, MPR RI Jakarta, Selasa (15/3).

Lebih lanjut menurutnya UU tersebut yang berfrase demokrasi ekonomi telah merontokkan kedaulatan BUMN yang notabene bekerja mencari ‘duit’ untuk rakyat, namun disamakan dengan perusahaan

swasta yang bekerja dan mencari ‘duit’ untuk kepentingan individu.

“Ini tidak berkeadilan, meski BUMN unit usaha yang mencari duit untuk seluruh rakyat Indonesia guna membantu negara memakmurkan rakyat, namun posisinya diperlakukan sama dengan usaha swasta yang mencari duit untuk dia sendiri,” tukasnya.

Irman mengingatkan bahwa UU tersebut melenceng dari konstitusi. Hakikatnya konstitusi menginginkan bumi, air serta kekayaan yang ada di dalamnya, mutlak dikuasai negara melalui unit usahanya (BUMN) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun yang terjadi malah migas menjadi sektor yang liberal.

“BUMN bukan lahir dari demokrasi ekonomi, apalagi tunduk pada keinginan pasar bebas, hal demikian yang membuat BUMN tak ubahnya unit usaha swasta demi kepentingan privat, bagaimana mungkin unit usaha kuasa negara harus berebutan objek usaha dengan swasta? Padahal jelas objek itu termasuk cabang produksi kekuasaan negara,” tegasnya.

Oleh karenanya Irman mengatakan negara harus tegas akan suatu sektor usaha yang harus dikuasai demi hajat hidup masyarakat banyak, dia menuntut agar UU No 17 tahun 2003 dilakukan revisi dan memperkuat kedudukan BUMN. /Arbie Marwan

JK: Memprihatinkan, Justru Pengusaha Besar Dapat Fasilitas Suku Bunga Rendah



Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), mengaku geram dengan industri perbankan yang

masih mematok

suku bunga tinggi, terutama untuk kalangan pengusaha kelas bawah atau usaha kecil dan menengah (UKM).

Sementara fasilitas yang diterima oleh kalangan pengusaha kelas atas justru mendapat suku bunga rendah. Langkah ini diambil oleh dunia perbankan karena ingin meraup untung besar.

“Kalau pengusaha kecil bunganya tinggi. Ini karena ada paradigma keliru di perbankan kita. Mereka anggap, pengusaha kecil ke rentenir mau saja bunga 30 persen, maka bank menawarkan ke mereka 20 persen pasti diambil,” tegas Wapres JK di Jakarta, Selasa (15/3).

Untuk itu, Wapres meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) bisa mendorong bank untuk menekan tingkat suku bunga. Sehingga, kata dia, bunga rendah akan menciptakan pemerataan dan lapangan kerja yang akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada dasarnya, jelas Wapres, motor penggerak ekonomi nasional justru ada pada kelompok usaha kecil dan menengah, bukan pengusaha besar.

Ia memberi contoh sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mampu menyelamatkan perekonomian nasional saat terjadi krisis 1998 silam. Bahkan, saat itu muncul fenomena kafe-kafe tenda yang sebenarnya mereka itu ikut menyelamatkan ekonomi negara Indonesia di saat itu.

“Saya ingat sekali, saat terjadi krisis 1998 yang bertahan justru UMKM, bukan perusahaan besar,” tutup JK. /Arbie Marwan



Le Cinquième Sommet Extraordinaire de l'OCI sur la Palestine et Al-Quds Al-Sharif

“UNIS POUR UNE SOLUTION JUSTE”

Jakarta — République d'Indonésie
le 27 Joumada Al-Awwal 1437 AH (le 7 Mars 2016)

السلامي

٢٠



Presiden Joko Widodo memberikan pidato penutupan KTT LB Ke-5 OKI mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif di JCC, Jakarta, Senin (7/3). KTT itu mengesahkan dua dokumen penting, pertama, resolusi yang menegaskan posisi OKI atas Palestina dan Al-Quds Al-Sharif dan kedua, Deklarasi Jakarta tentang aksi konkrit pemimpin OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

ANTARA



Suara Boikot Produk Israel dari Jakarta

Indonesia bersikap proaktif dengan menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI, yang khusus membahas isu Palestina, dan mendorong langkah-langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Namun, seberapa efektif langkah itu, masih harus dilihat.

Sesudah seminggu sebelumnya media nasional diisi dengan berita menjemukan tentang konflik antar-menteri, yang seharusnya tak perlu diumbar di luar rapat kabinet, Presiden Joko Widodo tampil percaya diri di forum internasional. Pada penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Jokowi menyerukan boikot atas produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan.

Seruan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato penutupan KTT, 7 Maret 2016, di Jakarta. Presiden mengatakan, terdapat urgensi bagi OKI untuk meningkatkan dukungan terhadap Palestina, dan menguatkan tekanan kepada Israel, melalui sejumlah langkah konkret. Salah satunya, boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah Palestina yang diduduki.

Seruan Jokowi itu cukup keras, walau bukan hal yang baru, karena sejumlah negara Eropa telah menyuarakan hal serupa, sebagai ekspresi penolakan mereka terhadap tindakan Israel yang terus menghambat upaya perdamaian Palestina-Israel. Israel terus membangun permukiman Yahudi secara ilegal di wilayah Palestina. Bahkan otoritas Israel sering mengusir rumah-rumah warga

Palestina yang dianggap “mendukung serangan terhadap Israel.”

Seruan Jokowi tentu juga populer bagi kalangan Muslim dan ormas-ormas Islam di Tanah Air. Sikap Jokowi itu dinilai oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin sebagai hal yang tepat, mengingat Israel sudah sejak lama menindas warga Palestina. Boikot produk diharapkan mampu membuat Israel berpikir ulang atas aksi penindasan yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Namun, dalam arti praktis, seruan Jokowi mungkin lebih bersifat simbolis dan politis. Karena kalau mau bicara detail, apa saja sih produk Israel—yang jelas-jelas ditulis *Made in Israel*—yang beredar di Indonesia? Praktis bisa dibilang “tidak ada.” Produk agrikultur Israel yang mengeksploitasi daerah pendudukan tampaknya lebih banyak diekspor ke Eropa, yang secara geografis lebih dekat. Hubungan ekonomi Indonesia-Israel sangat minimal atau nilainya tidak berarti, dan secara resmi kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik.

Perlu Meningkatkan Tekanan

KTU Luar Biasa OKI, yang dihadiri oleh perwakilan dari 57 negara, sejak awal memang memusatkan perhatian untuk membahas masalah Palestina dan Jerusalem. Sebanyak lebih dari 600 delegasi telah mengikuti sidang pejabat tingkat tinggi dan dewan menteri luar negeri, pada 6 Maret 2016. Palestina saat ini diakui oleh 137 negara dan berhasil meraih status negara peninjau di PBB.

OKI pertama kali dibentuk pada 1969 di Maroko sebagai respons atas aksi pembakaran Masjid Al-Aqsa di Jerusalem, oleh kaum ekstremis Yahudi. Namun, sejumlah perundingan damai Palestina-Israel selama beberapa dekade terakhir justru diwadahi negara atau organisasi lain, bukan OKI.

Dalam pidato penutupannya, Jokowi juga meminta semua anggota OKI menguatkan dukungan politis untuk menghidupkan kembali proses perdamaian Palestina-Israel. “Peninjauan kembali Quartet, dengan kemungkinan penambahan



anggotanya. Indonesia siap untuk berpartisipasi dan mendukung mekanisme ini,” kata Jokowi. Quartet yang dimaksud Jokowi adalah empat pihak yang terlibat sebagai sponsor perundingan damai Palestina-Israel, yaitu: Amerika Serikat, Rusia, PBB, dan Uni Eropa.

Jokowi juga menambahkan perlunya peningkatan tekanan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memberikan perlindungan internasional bagi Palestina, serta penetapan batas waktu pengakhiran pendudukan Israel. Termasuk pula, penolakan tegas terhadap pembatasan akses beribadah ke Masjid Al-Aqsa serta tindakan Israel yang mau mengubah status-quo dan demografi Al-Quds Al-Sharif.

Israel telah membangun banyak permukiman Yahudi secara ilegal, dan sudah masuk hingga ke Jerusalem Timur, yang berstatus wilayah pendudukan. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi komposisi demografi di wilayah tersebut, dan dapat membuat rakyat Palestina kehilangan hak atas wilayah mereka. Bahayanya, kehadiran permukiman Yahudi tersebut akan mengubah komposisi demografi di Palestina.

Awalnya, di wilayah Jerusalem Timur dulu banyak tinggal masyarakat Palestina. Tetapi semakin hari jumlah mereka semakin menipis dan terdesak dengan adanya pemukim Yahudi (*Jewish settlers*)



Seorang guru mengajar murid Palestina Badui di luar ruangan dekat perumahan Maale Adumim Yahudi (terlihat di latar belakang), desa Al-Eizariya Tepi Barat, timur Yerusalem, Selasa (1/3). Pasukan Israel membongkar karavan yang digunakan sebagai ruang kelas untuk sekolah komunitas Badui pada tanggal 20 Februari, menurut penduduk. Menurut pejabat sekolah, tentara Israel memberitahu mereka bahwa kontainer dipindahkan karena mereka tidak memiliki izin bangunan yang dikeluarkan Israel untuk tinggal di daerah tersebut.

ilegal. Jadi, jika suatu hari diadakan referendum, dikhawatirkan pihak Palestina bisa kalah karena Jerusalem Timur isinya pemukim Yahudi semua, karena lima juta lebih rakyat Palestina berada di luar wilayah itu.

Itulah sebabnya Indonesia menyerukan upaya-upaya, untuk mengakui hak pengungsi Palestina untuk pulang kembali ke kampung halaman mereka di Palestina. Isu hak pengungsi Palestina untuk pulang



ke tanah airnya ini ditentang keras oleh Israel, dan masih menjadi isu yang mengganjal dalam perundingan Palestina-Israel. Ada lima isu utama yang selama ini belum ada titik temu antara Israel dengan Palestina, yakni status kota Jerusalem, hak pengungsi Palestina, garis perbatasan Israel-Palestina, keamanan, dan akses terhadap sumber daya air.

Deklarasi Jakarta

Pada akhir KTT OKI, telah disahkan dua dokumen penting. Pertama, adalah resolusi yang menegaskan kembali posisi prinsip dan komitmen OKI terhadap Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Resolusi ini diharapkan sejalan dengan kehendak rakyat Palestina. Kedua, adalah Jakarta Declaration, sebagai inisiatif Indonesia, yang memuat rencana aksi konkret para

pemimpin OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

Jokowi menegaskan, melalui KTT ini, sejarah akan mencatat bahwa para pemimpin dunia Islam telah mengirimkan pesan kuat kepada seluruh pihak yang terlibat dalam konflik di Palestina. Jokowi juga meminta agar seluruh anggota OKI turun tangan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan, yang mendesak di wilayah pendudukan.

Sejauh ini, kontribusi Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina termasuk mempersiapkan kapasitas bangsa Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, melalui pelatihan tata kelola pemerintahan yang baik, pendidikan, kepolisian, pertanian, dan keterampilan lainnya. Hingga akhir 2014, Indonesia telah melakukan pelatihan pembangunan kapasitas

bagi 10.000 warga Palestina di berbagai bidang.

Indonesia juga menjadi tuan rumah bersama Jepang menyelenggarakan Kerja Sama Negara-Negara Asia Timur untuk Pembangunan Palestina (CEAPAD) II di Jakarta, yang memfokuskan bantuan pelatihan bagi pembangunan ekonomi dan bisnis Palestina.

Sebagai bukti konkret dukungan terhadap Palestina dan penguatan hubungan bilateral, dalam pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, 6 Maret 2016, Jokowi menyatakan akan mengutus Menlu RI ke Ramallah, untuk meresmikan Konsulat Kehormatan RI di kota Tepi Barat itu pada Maret 2016. Sosok yang akan menjadi Kepala Konsulat Kehormatan Indonesia di Ramallah adalah Maha Abou Susheh (53).

Abou Susheh adalah Ketua Forum Pengusaha Wanita Palestina (BWF) di Ramallah sejak 2006. Ia adalah alumnus Universitas Birzeit di Ramallah, universitas terbesar di Palestina, dan dikenal sebagai aktivis sejak masa mahasiswa di Birzeit. Pasca lulus dari perguruan tinggi, perempuan itu aktif di kegiatan sosial dan bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat.

Abou Susheh kini dikenal sebagai pengusaha sukses Palestina dan memimpin beberapa perusahaan miliknya. Sebagai Ketua BWF, Abu Susheh memiliki kedekatan hubungan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan PM Palestina Rami Hamdallah. Abu Susheh juga dekat dengan negara-negara Barat dan Indonesia.

BWF adalah LSM non-profit untuk memajukan perekonomian kaum wanita Palestina. BWF memiliki program sosial dan ekonomi, dan sering mengadakan pelatihan memasak dan menjahit untuk kaum wanita Palestina, agar mereka punya keterampilan dan bisa hidup mandiri. BWF sering menggagas, mendirikan, dan menggerakkan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk kaum wanita Palestina. ● Satrio Arismunandar

Keluarga Harus Aware pada Warning Sign DBD

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat di tahun 2014, terdapat 71.668 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan 641 kematian. Dalam hal ini Indonesia termasuk dalam kategori A (Endemik tinggi) yang berarti penyakit DBD merupakan salah satu alasan utama rawat inap dan salah satu penyebab utama kematian pada anak.

DBD menjadi ancaman kesehatan terbesar, yang mana pertumbuhannya sangat cepat di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Akan tetapi, meskipun penyakit ini sangat serius, masih banyak sebagian masyarakat yang masih memiliki pengetahuan minim akan gejala atau tanda-tanda serta cara penanganan awal yang tepat yang berdampak pada tingginya mortalitas, khususnya pada anak-anak.

Melihat hal tersebut, DR.dr. Aman B.Pulungan, SpA(K) yang merupakan Ketua IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) mengungkapkan hal serupa yang mana penanganan DBD membutuhkan tindakan proaktif dari semua elemen masyarakat. Hal

tersebut diungkapkan dokter Aman kepada Majalah Aktual, di Jakarta, baru-baru ini.

“Rendahnya pemahaman akan DBD dan penanganannya, membutuhkan tindakan proaktif dari semua elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap penanggulangan dan pencegahan DBD di Indonesia,” ujar Aman.

Jika berdasarkan saran dari WHO, penanganan yang tepat untuk pasien DBD dimulai dengan memberikan cairan yang cukup serta penanganan demam yang tepat.

Tanda DBD. Namun, bagaimana kita dapat membedakan bahwa ini adalah demam DBD dan mana yang demam biasa?

Berangkat dari situ, Dokter Spesialis Anak, Konsultan Bidang



Pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/3).

Tanda-tanda Pasien DBD Masuki Fase Kritis



1. Tidak ada perbaikan setelah suhu turun.
2. Tidak Mau makan dan minum.
3. Muntah terus menerus.
4. Nyeri perut hebat.
5. Lemah, lesu, dan ingin tidur terus.
6. perubahan perilaku menjadi lebih pendiam.
7. Pucat, tangan dan kaki dingin.
8. Pendarahan (BAB hitam, muntah hitam, dan menstruasi tidak berhenti)
9. Tidak buang air kecil lebih dari 4-6 jam.

Infeksi dan penyakit tropis, Prof. DR.dr.Sri Rezeki Hadinegoro, Sp.A(K) mengatakan, bahwa ada beberapa tanda yang patut dicurigai dari demam berdarah dengue.

“Pada dengue demamnya mendadak. Misalnya pagi masih sekolah, malamnya dengue. Itu bedanya dengue dengan penyakit lain,” ungkap Sri

Lebih lanjut, dokter Sri menjelaskan, bahwa demam yang dialami secara mendadak suhunya juga cukup tinggi. Yaitu, mencapai lebih dari 38 derajat celsius. Dan, pada demam berdarah, didapat munculnya gejala, seperti sakit kepala, nyeri otot dan sendi, nyeri belakang mata, hingga muncul ruam kulit.

Dokter Sri kembali menerangkan bahwa demam yang disertai pilek



dan batuk tersebut bukan DBD. "Kalau demam plus pilek dan batuk, itu sudah pasti bukan dengue. Kalau demam enggak jelas, nyeri sendi, itu dengue," lanjut dokter Sri menerangkan.

Guru besar FKUI ini pun kembali menjelaskan lebih lanjut bahwa orang tua harus lebih *warning sign*, bila anak demam, terutama bayi yang masih di bawah usia lima tahun.

"Hal yang sangat penting adalah mengenali tanda-tanda bahaya atau *warning sign* terhadap pasien DBD terutama pada anak. Pada anak-anak, demam yang muncul sering kali disertai dengan mual, muntah, nyeri perut, dan diare. Gejala demam pada anak harus diwaspadai oleh orang tua, apalagi pada anak berusia di bawah lima tahun. Sebab, balita belum bisa mengungkapkan

keluhannya dengan jelas, hanya bisa menangis ketika merasa sakit," jelas ia panjang lebar.

Adapun yang dimaksud oleh Prof. Sri dari *warning sign* yang harus diwaspadai sebagai fase kritis yakni, tidak adanya perbaikan setelah suhu turun, pasien menolak makan dan minum, muntah terus menerus, nyeri perut hebat, lemah, lesu, ingin tidur terus, pucat, kaki dan tangan dingin.

Sedangkan, pendarahan pada BAB disertai perubahan warna yang menghitam, dan tidak buang air kecil lebih dari 4-6 jam.

Nyamuk penyebab DBD.

Demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang persebarannya melalui gigitan nyamuk betina *Aedes Aegypti* yang sebelumnya telah terinfeksi virus dengue. Penyakit ini sering 'diperlakukan' biasa. Padahal

berdasarkan statistik medis, sudah ada banyak nyawa yang melayang.

Terkait nyamuk *Aedes Aegypti* tersebut, Prof DR dr Sri Rezeki Hadinegoro, SpA(K), Guru Besar Divisi Infeksi dan Penyakit Tropis, Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM, menjelaskan bahwa nyamuk *Aedes* yang khusus menggigit manusia hanyalah nyamuk betina, bukan nyamuk jantan. Nyamuk ini memiliki karakter yang terbilang cukup unik karena hanya keluar di siang hari.

"Nyamuk betina pembawa virus dengue penyebab DBD sama seperti kita para perempuan yang senangnya terbang di siang hari, tidak suka keluar pada malam hari," seloroh Prof. Sri melempar senyum kepada Majalah Aktual.

Sri melanjutkan, bahwa nyamuk *Aedes Aegypti* betina tersebut, pada waktu aktif, hanya hidup selama beberapa bulan. Dan, akan mencari darah untuk memperoleh asupan protein yang diperlukan dalam memproduksi telur.

"Nyamuk betina ini terbangnya tidak bisa terlalu tinggi dan jauh-jauh. Cari makannya yang dekat-dekat saja. Makanya, infeksi yang disebarkan nyamuk ini biasanya menular pada lingkungan kecil seperti sebatas rukun tetangga (RT)," beber dokter Sri dengan nada bercanda.

Tak hanya itu, Sri mengungkapkan bahwa nyamuk *Aedes Aegypti* sangat suka dengan aroma tubuh manusia. Seperti keringat yang keluar ketika beraktivitas. "Nyamuk ini senang dengan keringat manusia. Jadi jangan heran mengapa nyamuk suka menempel di baju-baju berkeringat yang digantung," ungkapnya kembali.

Prof Sri kembali menjelaskan bahwa nyamuk *Aedes Aegypti* juga merupakan pembawa virus lain seperti Chikungunya dan demam Zika yang belakangan merebak. Untuk itu, sangat perlu melakukan pencegahan perkembangan nyamuk *Aedes Aegypti* dengan memberantas jentik dan sarang nyamuknya. ◻

Leonina K Lahama-Ferro Maulana

Orang Indonesia Asli

Hendrajit

Bangsa Indonesia berarti orang Indonesia asli, bukan sekadar warga negara Indonesia. Kalau warga negara, saudara-saudara saya juga banyak yang sudah warga negara asing. Tapi tetap saja dia bangsa Indonesia, karena warga negara cuma soal status hukum sebagai pemukim tetap.

Kalau tidak menghayati Pancasila, ya pasti pandangan saya ini dianggap membingungkan. Pancasila itu hasil blenderan adat istiadat, kebudayaan dan keagamaan, yang menyatu secara geografis dengan tanah kelahirannya. Inilah yang mengkarakterisasikan orang orang Indonesia, makanya disuratkan dalam UUD 1945 sebagai orang Indonesia Asli.

Maka, orang orang Indonesia asli itulah yang boleh jadi presiden, gubernur sampai lurah. Karena orang orang Indonesia asli inilah yang bisa bersenyawa dan senafas dengan kondisi budaya maupun geografis tanah air. Dan tentu saja, paham lahir batin orang orang Indonesia asli di lingkungan terdekatnya maupun dalam lingkup yang lebih nasional.

Disebut sebagai sebuah bangsa, sudah pasti punya sejarah panjang, maka pelajarilah. Jangan hanya disebut tetapi tidak tahu sejarahnya.

Disebut sebagai sebuah bangsa karena bangsa itu sudah tentu punya cita-cita. Untuk mengetahui cita-cita bangsa, maka pelajarilah kembali dari sejarahnya.

Disebut sebagai sebuah bangsa, tentu karena memiliki wilayah yang sudah didiaminya lama sekali, mungkin ratusan atau bahkan mungkin ribuan tahun. Karena itu pelajari pula dengan seksama sejarah wilayah bangsa itu.

Disebut sebagai sebuah bangsa karena bangsa itu memiliki bahasa persatuan. Karena itu pelajari dengan baik dan benar bahasa persatuan bangsa.

Bangsa Indonesia tidak muncul dengan *ujug-ujug*, tapi berproses cukup lama. Maka pelajarilah sejarahnya dengan seksama.

Ada baiknya kita saat ini mengingat kembali sejarah terlahirnya Bangsa Indonesia dan terbentuknya Negara Indonesia agar kita semua menjadi tahu dan mengerti kedudukan bangsa, rakyat, negara, pemerintahan dan warga negara.

Negara Indonesia ini tidak akan ada jika tidak ada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak akan ada jika tidak ada Bangsa Indonesia. Jadi, Negara Indonesia tidak akan ada jika tidak ada Bangsa Indonesia. Siapakah Bangsa Indonesia?

Pahami ini dulu, nanti akan tahu mana tuan rumah dan mana tamu! Semua dasarnya kemanusiaan juga

Untuk mengerti dan memahami UUD Negara Indonesia 1945, mutlak harus memahami naskah Pembukaan UUD Negara Indonesia 1945.

Untuk memahami naskah Pembukaan UUD Negara Indonesia 1945, harus mempelajari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Untuk memahami Proklamasi 17 Agustus 1945 harus mengerti "Putusan Kerapatan Pemuda" 28 Oktober 1928.

Untuk mengerti bagaimana ada peristiwa "Kerapatan Pemuda," harus mengerti sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dan peran raja-raja di Nusantara.

Tersebut adalah kunci. Tanpa mengerti ini, akan salah memahami Indonesia dan Keindonesiaan (1. Bangsa Indonesia, 2. Rakyat Indonesia, 3. Negara Indonesia, 4. Pemerintahan NRI, 5. Warga Negara Indonesia).

Tapi kalau tidak salah, dalam UUD 1945 hasil 4 kali amandemen yang sejatinya sekarang sudah berubah watak jadi UUD 2002, frase kata "orang Indonesia asli" sudah dihilangkan ya?•



Berita teraktual tersaji,
untuk Anda mengawali hari ...

Info Dan Pemasaran :

☎ 0812 053 8776 (Deddy) | 0838 210 4469 (Ranie) | 0818 2809 41 009 (Rhiza)

✉ iklan@aktual.com | marketing@aktual.com | sirkulasi@aktual.com

🌐 www.aktual.com

aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

Menyajikan informasi terhangat dan terpercaya,
disampaikan secara cepat, tepat, benar,
serta makin progresif!



INFO & PEMASARAN

 **Dedy 081 20 53 8776**
Rhiza 081 828 0941 009

 **marketing@aktual.com**
iklan@aktual.com